

**MODEL GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN KILANG MINYAK**

(Studi Kasus Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban)

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan

Memperoleh Derajat Gelar S-2

Program Studi Magister Sosiologi



Disusun oleh:

IBNU WAHAB MANAQIB

NIM: 201810270211017

DIREKTORAT PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

NOVEMBER 2020

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGUJI

MODEL GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KILANG MINYAK (Studi Kasus Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban)

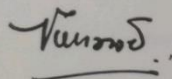
Diajukan oleh :

IBNU WAHAB MANAQIB
201810270211017

Telah disetujui

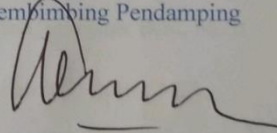
Pada hari/tanggal, **Senin/ 16 November 2020**

Pembimbing Utama



Dr. Vina Salviana D.S., M.Si

Pembimbing Pendamping



Dr. Achmad Habib, M.A.

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi



Prof. Dr. Ikhwanul In'am, Ph.D

Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

TESIS

Dipersiapkan dan disusun oleh :

**IBNU WAHAB
MANAQIB**

201810270211017

Telah dipertahankan di depan Dewan
Penguji pada hari/tanggal, **Senin/ 16
November 2020**

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai
kelengkapan memperoleh gelar Magister/Profesi di
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Vina Salviana D.S., M.Si

Sekretaris : Dr. Achmad Habib, M.A.

Penguji I : Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si

Penguji II : Dr. Fauzik Lendriyono, M.Si

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **IBNU WAHAB MANAQIB**

NIM : **201810270211017**

Program Studi : **Magister Sosiologi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **MODEL GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KILANG MINYAK (Studi Kasus Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban)** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 November 2020

Yang menyatakan,



IBNU WAHAB MANAQIB

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat dan karunianya sehingga Tesis dengan judul Model Gerakan Resistensi Masyarakat Terhadap Pembangunan Kilang Minyak (Studi Kasus Kilang Minyak Kabupaten Tuban) sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Studi Magister Sosiologi pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang telah berhasil terselesaikan.

Selama penyusunan Tesis ini mulai dari perencanaan sampai penyelesaian penulisan laporan banyak pihak yang turut membantu baik moril maupun materiil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada pihak-pihak yang mendukung terselesainya Tesis ini. Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada kedua orangtua dan keluarga karena dari doa dan pemberi semangat merekalah saya dapat menyelesaikan Studi dengan maksimal.
2. Prof. Dr. Akhsanul In'am, Ph.D selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang
3. Prof. Dr. Ishomuddin, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Dr. Vina Salviana Darvina Soedarwo, M.Si sebagai pembimbing pertama dan Dr. Achmad Habib, M.A. sebagai pembimbing kedua dalam membimbing saya dalam penyelesaian penelitian Tesis.
5. Masyarakat Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban atas waktu dan tempatnya yang turut membantu penyelesaian penelitian Tesis.
6. Teman-teman seangkatan 2018 Magister Sosiologi Pembangunan maupun Komunikasi.
7. Keluarga Unit Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Keluarga Jurusan Sosiologi dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Beserta teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah mendukung dan memberi semangat dalam pengerjaan penelitian Tesis ini.

Penyusunan Tesis ini penulis sadar masih banyak kekurangan. Penulis berharap kritik dan saran yang membangun agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca secara umum. Sehingga Tesis ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan untuk akademisi dan masyarakat umum.

Malang, 16 November 2020

Ibnu Wahab Manaqib

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGUJI.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
Pendahuluan.....	1
Kajian Pustaka.....	3
Landasan Teoritik.....	3
Penelitian terdahulu.....	3
Teoritik Gerakan Sosial Perlawanan Petani.....	5
Metodologi.....	11
Hasil Penelitian	14
Deskripsi Geografis dan Keadaan Topografi.....	14
Hasil dan Pembahasan.....	20
Model Analisis Teori dan Model Resistensi Masyarakat	34
Penutup.....	37
Kesimpulan	37
Saran.....	38
Daftar Pustaka	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Teoritik Gerakan Resistensi Scott	7
Gambar 2. Model Gerakan Sosial Petani	8
Gambar 3. Gerakan sosial klasik dan gerakan sosial baru	10
Gambar 4. Komponen-komponen data model interaktif (Huberman, 1984)	13
Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.	17
Gambar 6. Spanduk penolakan warga.....	33
Gambar 7. Spanduk warga tolak penetapan lokasi	33
Gambar 8. Bagan Model Analisis Teori Gerakan Resistensi.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Lokus Penelitian Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak.....	15
Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak Jenu	16
Tabel 3. Jumlah Berdasarkan Jenis Agama 5 Desa di Kecamatan Jenu	16
Tabel 4. Potensi Mata Pencaharian 5 Desa di Kecamatan Jenu.....	16
Tabel 5. Alur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.....	19
Tabel 6. Luas Penggunaan Lahan Pembanguna Kilang Minyak Kecamatan Jenu	20
Tabel 7. Pengelolaan Minyak Dan Kegunaan.....	22

MODEL GERAKAN RESISTENSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN KILANG MINYAK

(Studi Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban)

Ibnu Wahab Manaqib

ibnuwahabmanaqib@gmail.com

Dr. Vina Salviana D.S., M.Si

NIDN: 0721036201

Dr. Achmad Habib, M.A

NIDN: 0027124901

Program Studi Magister Sosiologi
Universitas Muhammadiyah Malang

ABSTRAK

Pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat dan mengurangi angka impor bahan bakar. Diprediksi aktivasi kilang minyak pada tahun 2024. Akan tetapi pembangunan kilang minyak merugikan masyarakat yang terdampak (Ring 1). Pentingnya penelitian ini untuk menganalisis konflik pada kedua pihak dan menganalisis model resistensi masyarakat menggunakan teori Scott. Tujuan penelitian yakni mendeskripsikan secara mendalam tentang proses dan model gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan tambang kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban. Paradigma menggunakan definisi sosial. Metodologi menggunakan kualitatif, studi kasus dan menggunakan *purposive* untuk mencari karakteristik pengambilan data. Analisis menggunakan kondensasi data, kemudian validasi data menggunakan triangulasi Teknik. Hasil penelitian, resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak sesuai dengan teoritik Scott terdapat bentuk resistensi terbuka dan tertutup yang di pengaruhi *kepercayaan* dan kontrol sosial oleh faktor ideologi, politik, ekonomi dan volunteerisasi dari aktor. Ditambah dengan analisis gerakan sosial baru karena adanya ideologi dalam melindungi alam (lahan hijau).

Kata kunci: Kilang minyak, resistensi, aktor, dan gerakan sosial baru.

ABSTRACT

Construction of an oil refinery at PT. Pertamina in Jenu, Tuban Regency is expected to meet the needs of the community and reduce the number of fuel imports. It is predicted that the activation of oil refineries will be in 2024. However, the construction of oil refineries is detrimental to the affected communities (Ring 1). The importance of this research is to analyze conflict on both sides and analyze the community resistance model using Scott's theory. The research objective is to describe in depth the process and model of the community resistance movement towards the construction of an oil refinery in Jenu, Tuban. Paradigm uses social definition. The methodology uses qualitative, case studies and uses purposive to find the characteristics of data collection. Analysis using data condensation, then data validation using triangulation techniques. The results of the research show that community resistance to the construction of an oil refinery is in accordance with Scott's theory, there are forms of open and closed resistance that are influenced by social control and trust by ideological, political, economic factors and volunteerism from actors. Coupled with the analysis of new social movements because of the ideology of protecting nature (green land).

Keywords: Oil refineries, resistance, actors and new social movements.



Pendahuluan

Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia (terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama). Proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur (KPPIP, 2019). Signifikan proyek sendiri adalah Mengingat kebutuhan bahan bakar dan upaya pencapaian ketahanan energi di dalam negeri, Indonesia membutuhkan pertumbuhan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Tuban, bertujuan dapat menambah persediaan minyak mentah dan sebagai bahan bakar di Negara, karena Indonesia perlu menurunkan pemborosan bahan bakar impor. Melihat kebutuhan bahan bakar Indonesia yang membutuhkan lebih banyak, maka Pemerintah membutuhkan pembangunan kilang minyak dibangun di Tuban karena meranggapan akan produksi 300 ribu barel per hari. Produksi ini diharapkan menurunkan Indonesia dalam mengimpor bahan bakar yang disinyalir konsumtif bahan bakar naik karena mengikuti pertumbuhan masyarakat yang pesat juga dengan kata lain mengimbangi dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Riset dari Rozikin sebagai BPK RI (2015), menyebutkan bahwa Indonesia mengalami masalah ketahanan energi dan tata kelola minyak bumi. Hal ini karena laju produksi minyak bumi terus menurun sementara laju konsumsi terus naik sehingga menyebabkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak bumi terus membesar. Tata kelola minyak bumi yang belum baik, menambah masalah kesenjangan tersebut. Melihat konsumtif Indonesia yang naik menjadikan kesenjangan produksi minyak dan konsumtif tidak berimbang. Adanya konsumtif ini menjadikan kesenjangan naik, dilihat dari Indonesia menaikkan impor minyak karena stok dalam negeri kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maka diharapkan adanya pembangunan kilang minyak bisa mengurangi nilai impor terhadap bahan bakar minyak bumi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Gerakan masyarakat Jenu yang merasa menentang belum mengerti tentang pemahaman ketahanan energi dan tata kelola minyak bumi yang dimana pembangunan sektor minyak dibutuhkan karena kepentingan pembangunan industri dapat mengurangi nilai impor dan mengurangi dampak kesenjangan sosial yang ada di Negara Indonesia. Gerakan masyarakat yang menentang adanya pembangunan industri sektor minyak ini melihat dari segi lain yakni dampak negative dari pembangunan industri. Kekhawatiran masyarakat dari pembangunan adalah menggeser jumlah sektor lahan agraris yang akan dipergunakan dalam pembangunan industri tersebut.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menegaskan apabila kekayaan alam dan bumi dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk keperluan masyarakat sebesar-besarnya (Ruslina, 2012, p. 55). Dengan demikian, maka penguasaan negara harus dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan frase “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Bila hal itu tidak dilakukan, maka bisa jadi negara melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kasus penolakan dengan melakukan gerakan-gerakan perlawanan secara ilmu sosial adalah gerakan sosial yang

dilakukan oleh masyarakat dalam merubah maupun menolak akan tindakan yang kurang sesuai dalam ruang lingkup kelompok masyarakat tersebut. Seperti halnya karakteristik gerakan sosial yang dijelaskan oleh Manalu dalam teori Della, Donatella dan Diani (1999), gerakan sosial merupakan jaringan-jaringan informal yang mendasarkan diri pada perasaan dan solidaritas Bersama yang bertujuan memobilisasi isu-isu konfliktual melalui berbagai protes atau perlawanan yang dilakukan masyarakat terus menerus (Manalu, 2007, p. 31).

Melihat fenomena resistensi sebagai gerakan sosial masyarakat sangat penting dalam mempengaruhi kebijakan publik. Seperti pada Jurnal Populasi oleh Dimpos Manalu (2007) tentang, gerakan sosial dan perubahan kebijakan publik (kasus perlawanan masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon, di Porsea, Sumatera Utara). Menjelaskan bahwa, gerakan sosial menjadi alternative yang lebih efektif dalam mendesak terjadinya perubahan kebijakan publik ketika berbagai mekanisme dan jalur formal amat minim, bahkan tertutup. Disisi lain, berbagai perdebatan “rasional” dan ilmiah di media massa, perdebatan para ahli, kontroversi di gedung parlemen, atau berbagai prosedur formal pengambilan kebijakan publik yang berada di dalam domain negara menjadi variabel-variabel yang hanya berarti dan mungkin terjadi karena desakan gerakan sosial tersebut.

Penolakan pembangunan Kilang Minyak oleh masyarakat Kecamatan Jenu, khususnya 5 Desa yakni Desa Mentoso, Desa Wadung, Desa Kaliuntu, Desa Sumurgeneng, dan Desa Rawasan masih terus berlangsung sampai sekarang agar pembangunan pertambangan tidak dilanjutkan oleh pihak BUMN (PT. Pertamina) dan investor dari Rusia (Rosneft). Kasus penolakan pembangunan kilang minyak belum pernah terjadi di daerah Jenu karena sebelumnya masyarakat tentram dengan lahan pertanian untuk bercocok tanam. Masyarakat yang melakukan gerakan resistensi inilah yang membuat peneliti ingin menemukan dan menjelaskan lebih detail model gerakan-gerakan resistensi masyarakat Jenu dalam melakukan penolakan pembangunan kilang minyak tersebut. Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis tentukan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara mendalam tentang proses dan model gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan tambang kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban.

Manfaat teoritis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan pengetahuan tentang gerakan sosial dan pengetahuan keilmuan sosiologi terutama dalam kajian-kajian yang berkaitan dengan model gerakan masyarakat secara teoritis memakai kacamata James C. Scott, yakni melihat gerakan resistensi sebuah tindakan perubahan. Kajian ini menambah referensi teoritis dari Scott yakni adanya gerakan resistensi yang terbagi dua, terbuka dan tertutup yang dilahirkan dari perilaku masyarakat. Manfaat praktis. Hasil Penelitian ini dapat dijadikan referensi peneliti berikutnya, perusahaan maupun instansi yang berkaitan dengan pembangunan pertambangan yang memiliki persamaan relevansi dengan peneliti yakni mengkaji tentang model gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan pertambangan maupun bidang industri yang terjadi di beberapa tempat.

Kajian Pustaka

Landasan Teoritik

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Pasal 1 tahun 2012 dalam penjelasan nomor 6 tentang kepentingan umum yang berisikan didalamnya kepentingan masyarakat, negara dan bangsa yang harus diwujudkan oleh pemerintah kemudian dipergunakan semaksimalnya untuk kepentingan umum atau rakyat (Indonesia Patent No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012). Tahun 1930 sampai dengan tahun 1960, kajian studi gerakan sosial meruncing pada kajian kacamata dari teori psikologi sosial klasik (Rusmanto, 2017, p. 1). Salah satu terpengaruh pandangan nazisme, fasisme, stalinisme, tindakan main hakim sendiri. Contoh, pengeroyokan main hakim sendiri dan sampai membunuh karena kesalahan seseorang/kelompok, tak terkecuali tindakan anarkis perusakan, kerusuhan yang diakibatkan masalah ras.

Kajian gerakan sosial fase pertama mengkaji isu-isu irasional dalam gerakan seperti perkumpulan banyak orang dan tindakan kolektif (Mirsal, 2004, p. 21). Resistensi/perlawanan terjadi pada semua kalangan kajian ilmu *social movement*, dimana para teoretis dalam kajian mereka mengabaikan studi aneka ragam terhadap bentuk penolakan (kacamata Scott dalam *social resistance*) pada jaringan individual serta bagaimana proses dinamika mobilisasinya gerakan itu pada ruang lingkup kecil (Scott, 1990: 393). Sekelompok orang yang berkumpul dalam keramaian dapat dianalogikan sebagai tentara era pertengahan dalam permasalahan penyerangan beberapa kuil. Menurut aktor, massa adalah ladang subur bagi para provokator atau aktor dari aksi yang memiliki rasa otoritas yang dominan (Mudzakkir, 2019, p. 70).

Penelitian terdahulu

Pertama. Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik (Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon, di Porsea, Sumatra Utara). Jurnal Populasi; Volume 8, Nomor 1, 27-50, ISSN: 0853-0262 Oleh: Dimpos Manalu (2007). Hasil penelitian ini menjelaskan bentuk ketidakpuasan; isu atau tuntutan; bentuk bentuk aksi; sistem politik; respons kebijakan pemerintah dan respons dari pembangunan perusahaan yang meresahkan masyarakat sekitar. Respons kebijakan, gambaran hubungan gerakan sosial dengan negara dan sistem politik secara luas, analisis dicontohkan fenomena “berkaca dari kasus gerakan perlawanan masyarakat di Toba Samosir”. Relevansi jurnal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan yakni memakai teori gerakan sosial, akan tetapi konsep ini kurang bagi peneliti karena peneliti mencari juga teori dari gerakan sosial baru untuk mengkritik gerakan sosial klasik sesuai analisis dari peneliti.

Kedua. *Social resistance to coal seam gas development in the Northern Rivers region of Eastern Australia: Proposing a diamond model of social license to operate* (Luke, 2017). *Journal Land Use Policy* Volume 69 (2017) 266–280. Oleh: Hanabeth Luke. Hasil penelitian ini menjelaskan gerakan resistensi masyarakat karena ketidaksesuaian lisensi perijinan yang dibuat oleh negara dalam mengelola/memberi ijin pembangunan perindustrian yang kemudian gerakan masyarakat ini merekomendasikan model baru agar dipakai oleh negara dalam

mengelola perijinan karena model yang lama tidak sesuai dan tidak berkelanjutan menjaga lingkungan sekitar. Relevansi jurnal ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena resistensi yang dilakukan masyarakat memberikan rekomendasi perijinan yang layak dan efektif. Akan tetapi, penelitian jurnal ini kurang tepat dalam sisi teoritis yang digunakan oleh peneliti menggunakan teori perlawanan James C. Scott.

Ketiga. Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus: Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup). Disertasi Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Malang. Oleh: Agus Prastya (2018). Hasil penelitian ini menjelaskan jenis perlawanan PKL pada relokasi pedagang di Kota Madiun Disertasi ini memakai teori James C. Scott untuk melihat bentuk perlawanan akan tetapi dalam temuan dari Disertasi melahirkan perlawanan semi atau bisa sebut perlawanan campuran dimana perlawanan mixed dari perlawanan terang-terangan dan tersembunyi yang kemukaan jenis perlawanan/Resistensi oleh James C. Scott. Relevansi disertasi ini relevan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti karena teori dalam penelitian tersebut menggunakan James C. Scott untuk menganalisis fenomena gerakan resistensi masyarakat karena adanya ketidaksesuaian relokasi yang terjadi di Kota Madiun. Akan tetapi, penelitian yang akan dilakukan peneliti bukan dilingkungan PKL seperti pada Disertasi tersebut melainkan meneliti gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Keempat. Resistensi Petani Tembakau Terhadap system kemitraan perusahaan tembakau di Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan lamongan Jawa Timur. Jurnal Analisa Sosiologi. April 2019, 8(1): 35-57. Oleh Nuril Endi Rahman (2019). Hasil penelitian ini menjelaskan resistensi yang lahir pada petani tembakau di Gunung kidul dan daerah Lamongan adalah perlawanan karena adanya ketioangan yang merugikan petani dalam system kemitraan dengan perusahaan tembakau. Resistensi yang dilakukan masyarakat adalah jenis perlawanan tertutup, semi terbuka dan terbuka (james C. Scott) untuk menuntut keadilan dalam system kemitraan. Relevansi jurnal ini relevan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti karena adanya resistensi antara masyarakat petani dan perusahaan karena adanya ketidaksesuaian system kemitraan dari perusahaan Tembakau. Akan tetapi yang membedakan dengan peneltian yang akan dilakukan peneliti adalah kajian gerakan resistensi masyarakat yang terjadi karena lahan pertanian masyarakat dipakai sebagai lokasi pembangunan kilang minyak.

Kelima. Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara. Volume 1, Nomor 2, Desember 2015: 128– 140. Oleh: Rozikin (2015). Hasil penelitian ini menjelaskan Indonesia mengalami masalah laju produksi minyak bumi terus menurun sementara laju konsumsi terus naik sehingga menyebabkan kesenjangan antara produksi dan konsumsi minyak bumi terus membesar. Adanya konsumtif ini menjadikan kesenjangan naik, dilihat dari Indonesia menaikan impor minyak karena stok dalam negeri kurang untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Maka diharapkan adanya pembangunan kilang

minyak bisa mengurangi nilai impor terhadap bahan bakar minyak bumi yang dibutuhkan masyarakat Indonesia. Relevansi jurnal ini relevan dengan kajian tambahan dalam perspektif pemerintah yang dimana kilang minyak ini perlu dibangun karena produksi minyak negara menipis sedangkan masyarakat memiliki konsumtif yang tinggi terhadap pemakaian minyak bumi untuk bahan bakar kebutuhan sekunder masyarakat. Kajian ini menjadi tambahan kerangka berfikir agar peneliti memiliki sifat netral tidak memihak Pro maupun Kontra terhadap pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban.

Keenam. Perlawanan Masyarakat Terhadap Corporate Social and Responbility (CSR) PT. PJB Tuban. (Jurnal Paradigma) Universitas Negeri Surabaya Vol. 8, No. 1, 2020 oleh Ahmad Wildan Habibi dan M. Jacky (2020). Hasil penelitian ini menjelaskan kurangnya ketidakmaksimalan dalam pemberian CSR dari PT PJB UBJOM PLTU Tanjung awar-awar, menjadikan masyarakat ring 1 (Desa Wadung) melakukan resistensi kepada *corporate* yang bersangkutan. Resistensi yang dilakukan masyarakat dengan cara terbuka dan tertutup seperti teoritis milik Scott. Kajian sosiologis relevan, yang di pakai oleh peneliti sebelumnya dalam jurnal memakai teoritis Scott tentang Resistensi terbuka dan tertutup dengan fokus lokasi Desa Wadung. Akan tetapi, peneliti mengkaji memakai analisis Scott fokus pada penolakan kilang minyak PT. Pertamina dengan mengidentifikasi model resistensi masyarakat Ring 1 yakni fokus lokasi ada 5 Desa (Wadung, Mentoso, Kaliuntu, Sumurgeneng, dan Rawasan).

Teoritik Gerakan Sosial Perlawanan Petani

Gerakan sosial baru (GSB), memiliki dua tipe tentang paham reduksi (*reductionism*) Marxisme klasik harus dicegah dari bentuk tindakan kolektif. Salah satunya yakni, paham reduksi ekonomi Marxisme (*Marxism's economic reductionism*) yang menganggap semua faktor signifikan politik dari tindakan sosial berasal dari logika ekonomi fundamental tentang produksi kapitalis (*capitalist production*) dan logika yang lainnya yang membentuk tindakan tersebut (Sukmana, 2016, p. 117). Gerakan sosial baru (GSB) secara kontras memiliki cara pandang tersendiri tentang logika dari tindakan yang berbasis dalam politik, ideologi, dan kultur sebagai akar dari tindakan-tindakan kolektif (*collective actions*), dan sumber-sumber lainnya tentang identitas (Sukmana, 2016, p. 118).

Memahami kembali analisis dan bentuk-bentuk formasi gerakan sosial baru atau bisa disebut juga *New Social Movement* yang berada pada dinamika masyarakat kontemporer. Tampilan bentuk formasi gerakan sosial baru dapat ditemui gerakan yang mengkaji permasalahan ekologi, gerakan perjuangan feminisme, permasalahan kelas kondisionalitas perekonomian (Rusmanto, 2017, p. 44). Sebagai contoh, gerakan lingkungan internasional menentang praktik yang memperparah pemanasan global dan bahaya lingkungan lainnya (Sukmana, 2016, pp. 123-124).

Scott membaca fenomena resistensi yang terciptanya problematika agraris yang dimana petani-petani dengan jumlah banyak dan melakukan tindakan penolakan secara kolektif. Keadaan kolektif petani dengan rasa emosi menjadikan ciri-ciri bentuk pendayagunaan petani yang tidak memiliki keadilan (Mustain,

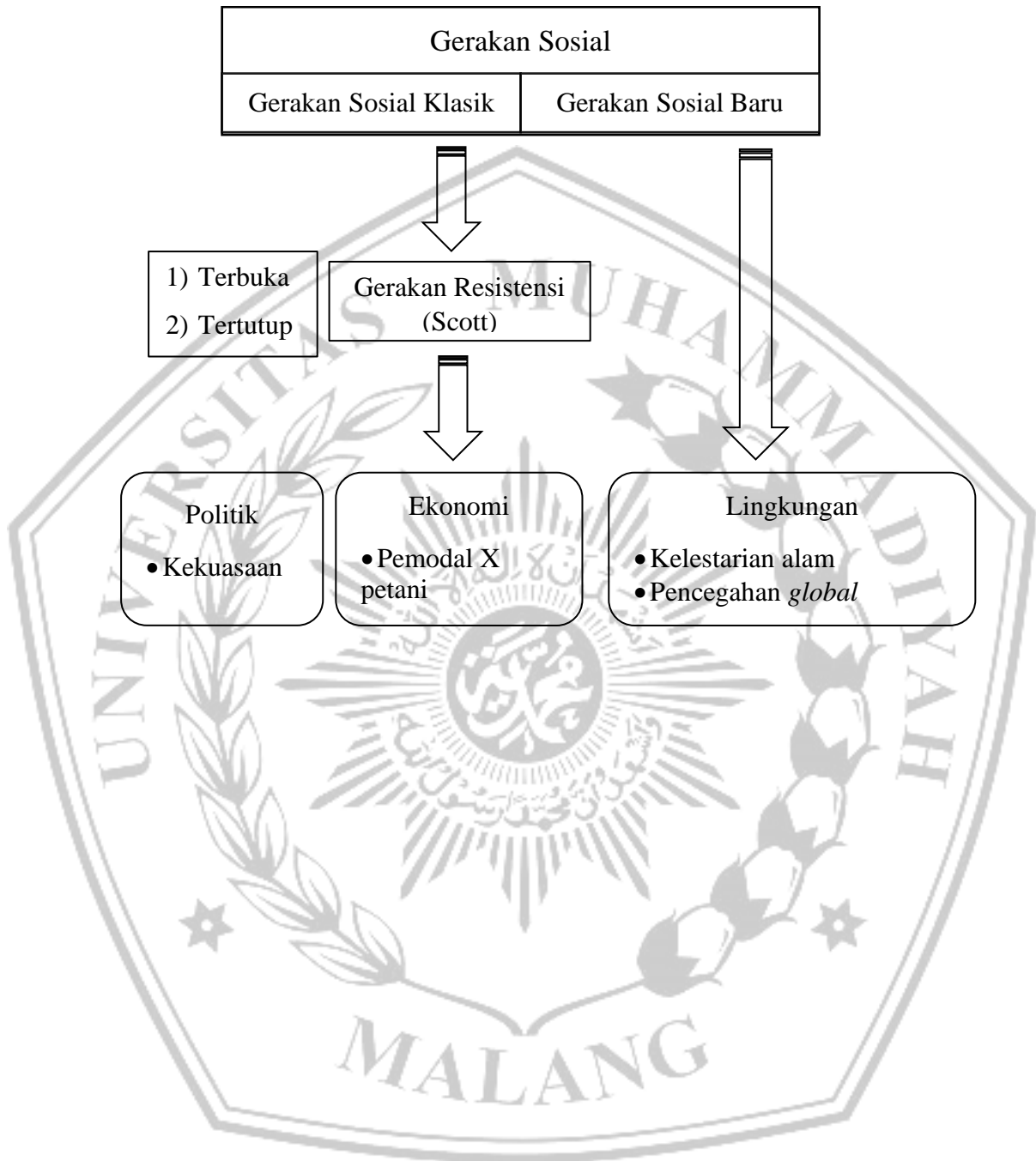
2007, p. 194). Gerakan petani merupakan gerakan yang bersifat reformatif, karena ia hanya menghendaki perubahan sebagian sistem yang melingkupi kehidupannya. Gerakan petani bisa digolongkan ke dalam tipe gerakan lama, tetapi dapat juga masuk dalam kategori sebagai gerakan baru (Wahyudi, 2005, p. 7). Kacamata dari Aditjondro, komponen-komponen pejuang lingkungan sebagai penyelamat lingkungan publik (*Publik Enviromentalist*) yaitu warga sekitar lokasi kerusakan lingkungan yang berkepentingan penyelamatan lingkungan dengan menggunakan sikap dan tindakan mereka. Dengan dipimpin tokoh masyarakat formal/informal, masyarakat dapat menyampaikan dan memperjuangkan keluhan-keluhan mereka (Susilo, 2012, p. 140).

Gerakan sosial yang menumbuhkan tindakan resistensi dikemukakan oleh Scott. Gerakan sosial yang menumbuhkan tindakan resistensi dikemukakan oleh Scott. Resistensi adalah setiap semua aksi tindakan pada masyarakat kelas bawah dengan tujuan melawan tekanan dari kebijakan atau tuntutan yang diberikan oleh kelas atas yang merugikan kelas bawah yang dominan untuk kepentingan kelas atas. Model resistensi bervariasi dan dapat ditemukan dalam bentuk ketidaktundukan, dan resistensi terhadap kondisional yang merugikan kelas bawah (Alisjahbana, 2005, p. 22). Tindakan perlawanan dari James C. Scott (1990, p. 303), perlawanan merupakan tindakan yang sekurang-kurangnya melibatkan suatu pengorbanan perorangan, kolektif jangka pendek dan upaya memperoleh keuntungan bersama yang berjangka panjang, kerugian-kerugian jangka panjang dari pemogokan, pemboikotan atau bahkan penolakan memperoleh pekerjaan atau tanah garapan merupakan bentuk pengorbanan jangka pendek yang diharapkan mampu memberi keuntungan jangka panjang.

Resistensi terbuka menurut Scott, resistensi terbuka merupakan resistensi yang biasanya ditandai dengan adanya tindak kekerasan, keramaian, atau huru-hara. Resistensi yang terbuka bersifat; resistensi yang terorganisasi, dilakukan secara sistematis dan kooperatif; berprinsip atau komitmen; mempunyai akibat-akibat revolusioner; memiliki tujuan untuk melakukan tindakan berdasarkan penindasan (Alisjahbana, 2005, p. 24). Resistensi terselubung Scott, menjelaskan resistensi tertutup biasanya ditandai dengan adanya gossip atau isu antara satu orang dengan yang lain sehingga masyarakat memiliki persepsi yang sama tentang suatu obyek tertentu dan biasanya resistensi tertutup ini dilakukan dengan samar/terselubung. Resistensi terselubung bersifat; gerakan tidak terorganisasi, gerakan yang tidak sistematis, dan penolakan individual; dilakukan tanpa berpamrih peluang dalam kekuasaan (Alisjahbana, 2005, p. 24).

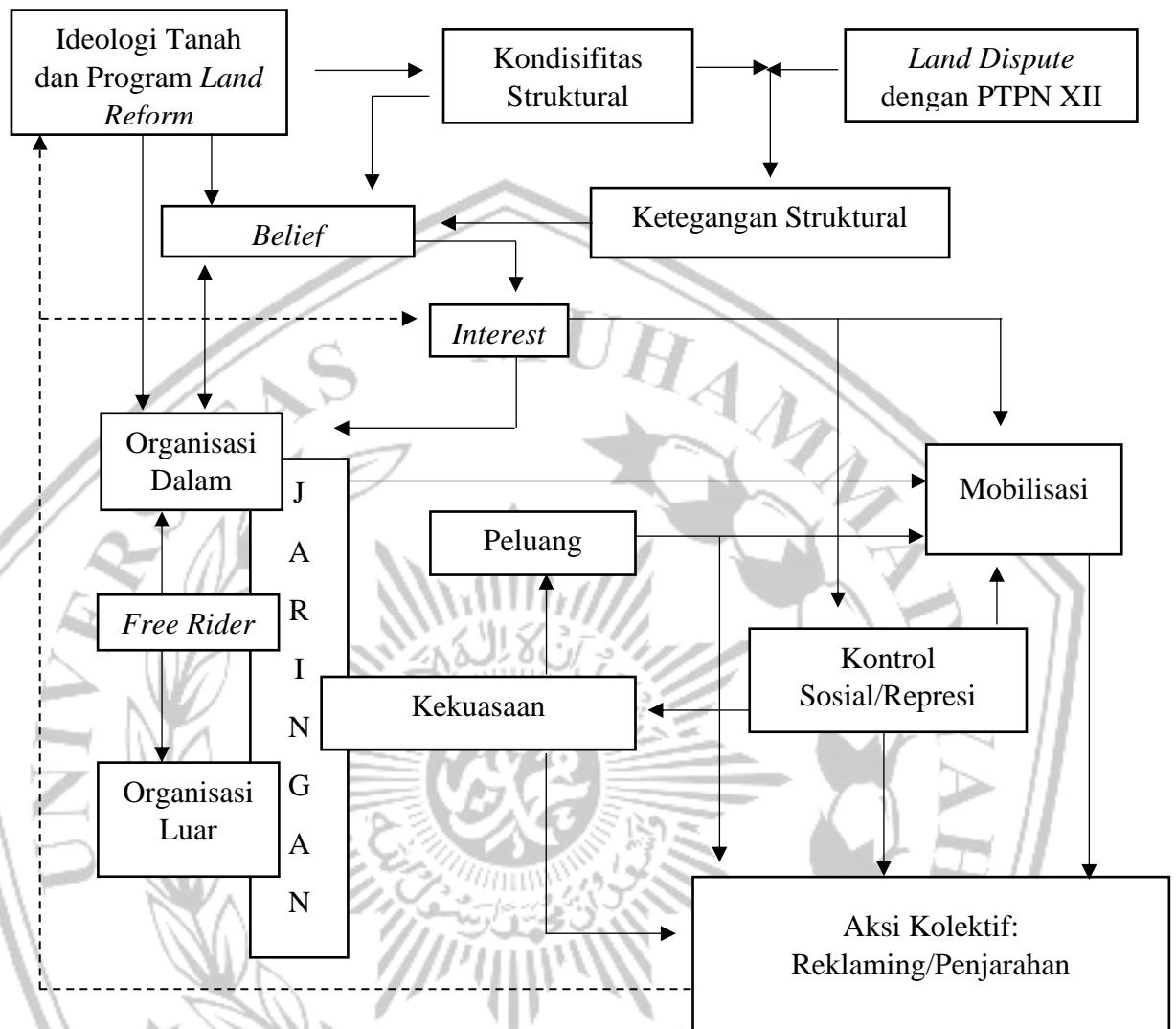
Kerangka teoritik gerakan sosial perlawanan Scott

Gambar 1. Bagan Kerangka Teoritik Gerakan Resistensi Scott



Gambar 2. Model Gerakan Sosial Petani

MODEL GERAKAN SOSIAL PETANI



Keterangan: Model di atas merupakan hasil konvergensi antara Teori Smelser dan Tilly dalam kasus Kalibakar

Model Gerakan Sosial Petani Kalibakar Malang Selatan (Wahyudi, 2005, p. 258)

Berdasarkan gerakan petani kasus pada penjarahan di Kalibakar Malang Selatan, model gerakan sosial petani temuan dari Wahyudi menjelaskan bahwa model gerakan petani di Kalibakar Malang selatan merupakan hasil konvergensi antara Teori Smelser dan Tilly (Wahyudi, 2005, pp. 259-274). Menurut Wahyudi, teori Smelser memberikan penekanan pada perilaku gerakan *norm-oriented* dalam menjelaskan fenomena yang melihat sebuah perilaku yang dilakukan oleh aktor gerakan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan aktivis dari kelompok mahasiswa. Sedangkan dalam teori Tilly memberikan penekanan pada *resources-oriented* yakni penekanan pada pengejaran kepentingan aktor dalam melihat kondisi ekonomi dan

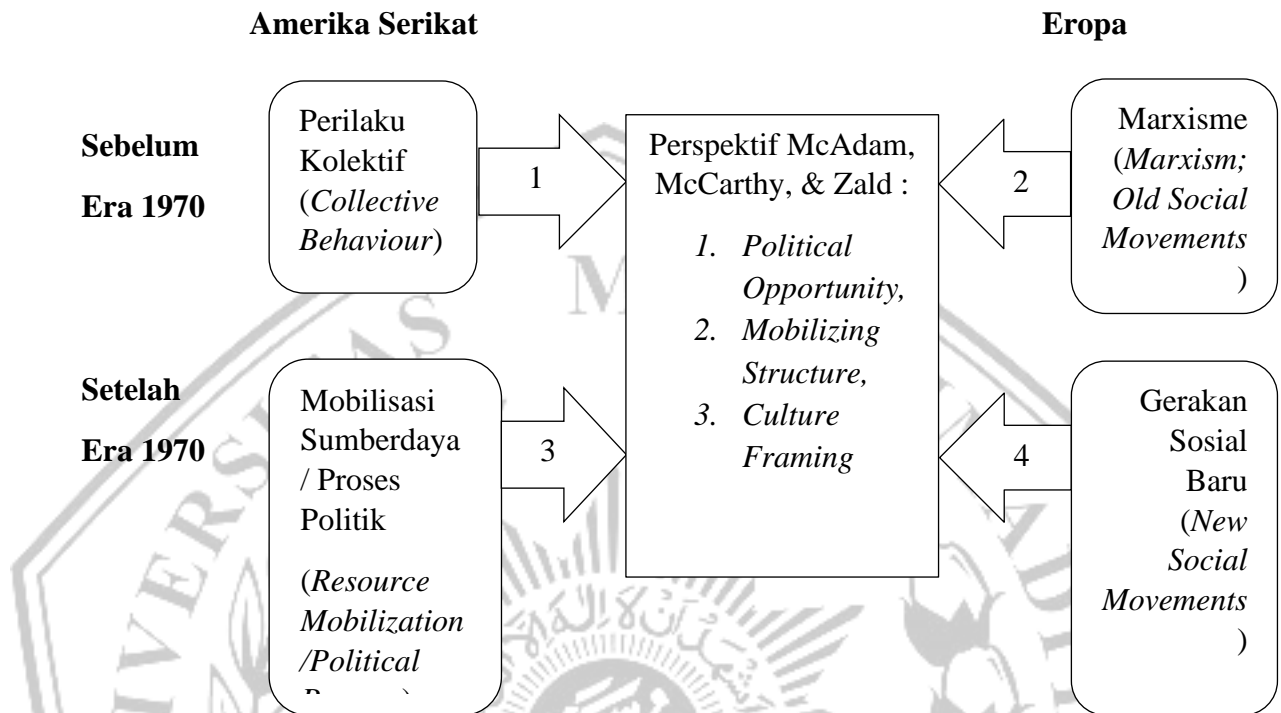
orientasi perpolitikan. Selain itu juga, gerakan menurut Tilly berasal dari kelompok petani, *free rider*, aktivis dari partai politik, dan dari pihak pemerintahan (pemegang kekuasaan).

Konvergensi kedua teori menurut Wahyudi dalam melihat fenomena gerakan Kalibakar Malang Selatan. Gerakan petani membutuhkan aspek penting dalam melakukan tindakan, diantaranya adalah *belief*, *interest*, kondisi struktural dan ketegangan struktural. Perpaduan aspek inilah yang dibutuhkan pada tahap mobilisasi gerakan agar tujuan dalam melakukan tindakan bersama tercapai. Akan tetapi, dalam tahap mobilisasi dibutuhkan juga kontrol sosial/represif karena kontrol sosial sangat menentukan perkembangan dan keefektifitasan cara memegang sebuah ideologi *belief*. Pemahaman ideologi *belief* yang disebabkan oleh adanya tahap kontrol sosial maka dukungan jaringan atau relasi untuk menambah kekuatan dari pihak luar (organisasi lain). Suatu gerakan, memiliki orientasi yang berbeda yang dilakukan oleh aktor dan partisipasi keanggotaan yang lainnya. Dalam fenomena di Kalibakar Malang Selatan, para aktor pemimpin gerakan aksi, Lembaga swadaya masyarakat dan aktivis dari pihak mahasiswa menekankan pada kritis pada nilai norma atau idealis. Sedangkan, kelompok petani bersama *free rider* dan pihak pemerintahan (pemegang kekuasaan) menekankan pada *resources* atau *interest* pada lingkup perekonomian dan perpolitikan.

Relevansi dari model gerakan petani milik Wahyudi (2005) dengan menggunakan konvergensi 2 teori milik Smelser dan Tilly adalah adanya aspek yang dibutuhkan untuk melakukan gerakan penjarahan/penolakan/resistensi dengan menggunakan aspek aktor gerakan, *free rider* (volunteer), jaringan sosial (relasi internal/eksternal), *belief* (kepercayaan), dan kontrol sosial (represif). Sedangkan, perbedaan dalam model Wahyudi (2005) yakni model hasil dari analisis permasalahan di Kalibakar Malang Selatan dikarenakan adanya konflik vertikal antara pemerintah dan pihak petani yang dimana masyarakat petani lebih mempertahankan faktor perekonomian sebagai petani dan aktor yang masuk untuk membantu juga memiliki kepentingan politik tanpa adanya alasan faktor penjagaan/pelestarian lingkungan alam yang diakibatkan oleh kepentingan pemerintahan.

Gambar 3. Gerakan sosial klasik dan gerakan sosial baru

Konstruksi Posisi Pemikiran McAdam, McCarthy, & Zald dalam Empat Tradisi Analisis Gerakan Sosial Crossley



Model Kontruksi analisis gerakan sosial klasik dan gerakan sosial baru (Sukmana, 2016, p. 205)

Perspektif MCAdam, McCarthy dan Zald dalam menganalisis gerakan sosial menurut Sukmana (2016), yakni *Political Opportunity*, *Mobilizing Structure*, dan *Cultural Framing* (Sukmana, 2016, p. 205). Perspektif yang dianalisis dari kajian gerakan sosial Amerika dan Eropa yang dilihat sebelum era 1970 dan setelah 1970. Pertama, dimensi perilaku kolektif yang ada pada Era 1970. Analisis pada perilaku kolektif yang berkaitan terhadap keluhan, ketidakpuasan dan kekecewaan sebagai pendorong utama yang menyebabkan tindakan aksi dilakukan secara kolektif. Kedua, dimensi Marxisme pada gerakan sosial lama menekankan terhadap konsep problematika dalam lingkup permasalahan ketimpangan sosial, dominasi masyarakat, kebebasan dan keadilan sosial. Ketiga, aspek dimensi mobilisasi sumber daya atau proses politik menjelaskan pada konsepsi rasionalitas perpolitikan dalam melihat sebuah peluang, rasionalitas perekonomian melihat problematika perihal keuntungan dan kerugian dalam tindakan gerakan sosial. Keempat, dimensi gerakan sosial baru (*New Social Movements*), memberikan penegasan pada konsep identitas sebagai *framing culture* dalam merangkai spiritual dan simpati dari gerakan sosial (Sukmana, 2016, p. 206).

Literatur sosiologi lingkungan, Gerakan Sosial Baru menekankan bahwa *New Social Movement* melihat perubahan dalam *life style* dan *culture*. Implikasi kajian Gerakan Sosial Baru pada gerakan lingkungan, anti peperangan, perdamaian dari sebuah konflik, kajian feminisme dan lainnya (Susilo R. K., 2019, p. 166). Implikasi pada gerakan lingkungan menekankan pada perbaikan lingkungan alam,

penjagaan lingkungan alam dan konservasi lingkungan alam yang dikarenakan fenomena masyarakat post-industrial. Gerakan sosial yang mengkaji fenomena perdamaian dalam lingkup makro dan juga mengkaji dalam hal problematika gender. Relevansi model gerakan sosial baru dari Sukmana (2016); Susilo (2019) dan hasil kajian penelitian menekankan gerakan lingkungan adalah gerakan sosial baru yang dimana kajian analisis lingkungan berada pada ranah gerakan sosial yang memperjuangkan kelestarian lingkungan alam.

Metodologi

Paradigma kajian ini menggunakan paradigma definisi sosial. Paradigma dengan pokok utama permasalahan karena adanya tindakan sosial antar hubungan sosial (individu dan kelompok). Paradigma definisi sosial memusatkan perhatiannya pada tujuan dari manusia yang melakukan hubungan sosial dan melihat manfaat dari makna tindakan bersama kelompok manusia (kelompok) pada tindakan-tindakan yang diciptakan. (Ritzer, 2016, p. 37).

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengetahui fenomena sosial pada masyarakat. Fenomena sosial yang bertujuan mengeksplorasi model gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak. Menurut Creswell, pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mempertimbangkan realitas subyektif yang dianut oleh objek penelitian (Creswell, 2002, p. 4). Penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus dimana peneliti ingin memahami dan menjelaskan isu di dalam kasus tersebut. Penelitian studi kasus mendeskripsikan pemahaman tentang isu dari beberapa individual atau kelompok yang akan diteliti.

In general, case studies are the preferred strategy when "how" or "why" questions are being posed, when the investigator has little control over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon within some real-life context. Such "explanatory" case studies also can be complemented by two other types- exploratory" and "descriptive" case studies. Regardless of the type of case study, investigators must exercise great care in designing and doing case studies to overcome the traditional criticisms of the method (Yin, 1994, p. 1).

Secara general, studi kasus yakni strategi yang diminati ketika pertanyaan "bagaimana" atau "mengapa" diajukan, ketika simpatisan memiliki sedikit kontrol atas peristiwa, dan ketika fokusnya ialah pada fenomena kontemporer dalam beberapa konteks kehidupan yang realitas. Studi kasus "eksplanatori" semacam itu juga dapat dilengkapi dengan dua jenis studi kasus "eksploratif" dan "deskriptif" lainnya. Terlepas dari jenis studi kasus, para peneliti harus sangat berhati-hati dalam merancang dan melakukan studi kasus untuk mengatasi kritik tradisional dari metode studi kasus (Manaqib & Erina, 2020, p. 7).

Peneliti mengambil studi dan akan menjelaskan dari resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban karena resistensi ini mempunyai hal yang ingin dijelaskan dengan rinci, jelas dan mendalam dengan menggunakan narasi yakni bagaimana adanya resistensi yang masih ambigu yang menjadikan peneliti resah ingin mencari model resistensi masyarakat dalam

menolak pembangunan kilang minyak yang pembangunan kilang minyak dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan alam dan alih fungsi lahan.

Letak lokasi penelitian adalah desa yang menjadi titik lokasi pembangunan dibangun, yakni ada Mentoso, Wadung, Kaliuntu, Sumurgeneng, dan Rawasan. Karena resistensi terjadi pada lokasi 5 Desa yang menjadi penetapan lokasi pada area yang akan digunakan perusahaan untuk melakukan pembangunan kilang minyak dikawasan Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Penetapan lokasi tersebut dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan tugas dan tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memberi ijin pembangunan seperti pada penetapan pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban.

Teknik *Purposive* digunakan oleh peneliti menentukan subjek penelitian dengan kriteria atau pertimbangan dan berdasarkan kompeten dibidangnya (Hikmat, 2011, p. 108). Teknik ini bertujuan untuk memfokuskan sumber subjek penelitian agar peneliti mudah mengumpulkan sumber data dilapangan.

Kriteria-kriteria penentuan subyek penelitian tersebut adalah:

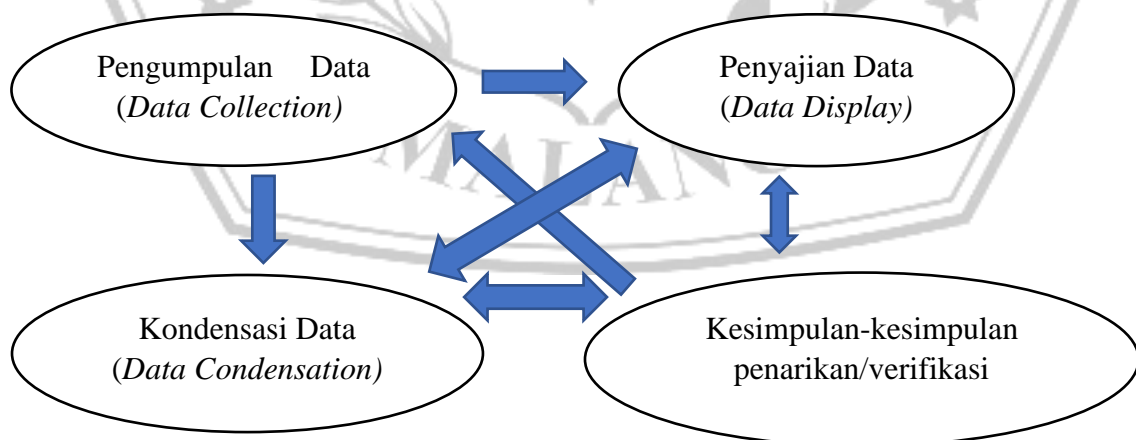
- A. Enam Kepala Desa yang akan dipilih menjadi 2, yakni aktif atau pasif dalam Gerakan resistensi tersebut:
 - 1) Kepala Desa Mentoso yang menjabat selama resistensi terjadi dari tahun 2019-2020 dan aktif dalam gerakan resistensi atau menjadi mediator resistensi pembangunan PT. Pertamina.
 - 2) Kepala Desa Wadung yang menjabat selama resistensi terjadi dari tahun 2019-2020 dan aktif dalam gerakan resistensi atau menjadi mediator resistensi pembangunan PT. Pertamina.
 - 3) Kepala Desa Kaliuntu yang menjabat selama resistensi terjadi dari tahun 2019-2020 dan aktif dalam gerakan resistensi atau menjadi mediator resistensi pembangunan PT. Pertamina.
 - 4) Kepala Desa Sumurgeneng yang menjabat selama resistensi terjadi dari tahun 2019-2020 dan aktif dalam gerakan resistensi atau menjadi mediator resistensi pembangunan PT. Pertamina.
 - 5) Kepala Desa Rawasan yang menjabat selama resistensi terjadi dari tahun 2019-2020 dan aktif dalam gerakan resistensi atau menjadi mediator resistensi pembangunan PT. Pertamina.
- B. Tokoh masyarakat desa yang pro maupun tokoh masyarakat yang kontra terhadap pembangunan kilang minyak. Dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tokoh masyarakat yang pro terhadap pembangunan kilang minyak dan sebagai mediator ketika resistensi terjadi.
 - b) Tokoh masyarakat yang kontra terhadap pembangunan kilang minyak dan sebagai gerakan resistensi PT. Pertamina.
- C. Dinas terkait perijinan pembangunan kilang minyak:
 - a) Badan Pertanahan Nasional, sebagai instansi terkait pengukuran lahan.
 - b) Dinas Lingkungan Hidup, sebagai instansi perijinan AMDAL.
 - c) Kantor Kecamatan Jenu, sebagai instansi pemerintah dari desa yang terdampak pembangunan PT. Pertamina.

- d) Kepolisian Resor Tuban, sebagai instansi pemberi perijinan aksi dan mediator aksi.

Metode observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu (Sugiyono, 2006, p. 13). Peneliti menggunakan observasi non-partisipan karena peneliti menyikapi netral dan tidak akan ikut serta menjadi partisipan yang masuk dalam kelompok pro maupun kontra dari pembangunan kilang minyak tersebut. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya (Sugiyono, 2012, pp. 233-234). Peneliti melakukan wawancara yang tidak terstruktur dengan maksud mengambil garis besar permasalahan dan tidak terstruktur karena peneliti ingin melakukan wawancara sesuai dengan kondisional di lokasi saat itu tanpa menyinggung yang akan diwawancarai.

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Secara detail bahan dokumentar terbagi beberapa macam, yaitu otobiografi, surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di server dan flashdisk, data tersimpan di website, dan lain-lain (Darmadi, 2014, p. 292).

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yaitu menganalisis data dengan tiga langkah: Kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik Simpulan atau verifikasi. Kondensasi data merujuk pada proses pemilihan (*selecting*). Pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih jelas, tahap-tahap berdasarkan teori Miles, Huberman dan Saldana (2014) akan diterapkan sebagai berikut:



Gambar 4. Komponen-komponen data model interaktif (Huberman, 1984)

Tenik validitas merupakan nilai kebenaran antara data yang dilaporkan pada objek penelitian dengan data yang dipilah kemudian dipaparkan oleh peneliti. Maka demikian data yang valid adalah data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Sugiyono, 2012, p. 267). Melakukan validasi data dengan berbagai sumber yang dilakukan dengan mencari data-data lain sebagai pembanding, mencari informasi lebih lanjut.

Triangulasi dapat dilakukan pada aspek metode dan pada aspek teori dimana dalam triangulasi metode dilakukan peninjauan ulang metode yang telah digunakan seperti dokumentasi, observasi dan catatan lapangan dan pada triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan teori lain sebagai metode validitas (Endraswara, 2009, p. 224). Perencanaan penelitian ini, memakai triangulasi teknik pengumpulan data dari observasi, wawancara, dan kusioner/dokumen yang terus disesuaikan satu sama lain untuk mendapatkan data yang valid tentang model gerakan resistensi masyarakat karena adanya pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten. Tuban. Menurut William Wiersma (1986), triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu (Sugiyono, 2012, p. 273).

Triangulasi Teknik untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain (Sugiyono, 2012, p. 274).

Hasil Penelitian

Deskripsi Geografis dan Keadaan Topografi Kabupaten Tuban

Kabupaten Tuban merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Tuban terletak pada 111,30' – 112,35' BT dan 6,40' - 7,18' LS. Batas Daerah, disebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur dengan Kabupaten Lamongan. Sebelah selatan dengan Kabupaten Bojonegoro dan disebelah barat dengan Propinsi Jawa Tengah. Luas Wilayah Daratan, Kabupaten Tuban adalah 1.839,94 Km² dengan panjang pantai 65 Km dan luas wilayah lautan sebesar 22.608 Km². (Tuban dalam angka 2019)

Kecamatan Jenu

Kecamatan Jenu berdasarkan Geologi wilayah, merupakan Mediteran Merah Kuning. Artinya berasal dari endapan batu kapur di daerah bukit sampai gunung. (Tuban dalam angka 2019)

Memiliki 17 desa, dengan jumlah kepala keluarga 17.696 KK. Jumlah penduduk perjiwa terjumlah 58.724 (laki-laki dan perempuan). Penduduk

Kecamatan Jenu memiliki golongan agama berjumlah 6 jenis yakni, Islma, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Berdasarkan pekerjaan Kecamatan Jenu dominan sebagai pengurus rumah tangga, petani/berkebun, nelayan/perikanan, wiraswasta dan karyawan swasta. (Data dari Kecamatan Jenu)

Batas Penelitian

Lokasi Penelitian berada di Kabupaten Tuban Kecamatan Jenu yang memiliki 17 Desa, yakni: Karangasem, Socorejo, Temaji, Purworejo, Tasikharjo, Sumurgeneng, Suwalan, Remen, Beji, Wadung, Rawasan, Mentoso, Jenggolo, Kaliuntu, Sekardadi, Jenu, dan Sugihwaras.

Lokus Peneliti berada di Kecamatan Jenu dengan fokus dengan 5 Desa karena desa tersebut sebagai Ring 1 pembangunan, 5 Desa tersebut adalah: Mentoso, Wadung, Kaliuntu, Sumurgeneng, dan Rawasan.

Tabel 1. Lokus Penelitian Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak

Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban	
Desa desa di Kecamatan Jenu	
1. Karangasem	11. Rawasan
2. Socorejo	12. Mentoso
3. Temaji	13. Jenggolo
4. Purworejo	14. Kaliuntu
5. Tasikharjo	15. Sekardadi
6. Sumurgeneng	16. Jenu
7. Suwalan	17. Sugihwaras
8. Remen	
9. Beji	
10. Wadung	
Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak	
1. Kaliuntu	
2. Wadung	
3. Rawasan	
4. Mentoso	
5. Sumugeng	

(Tuban dalam angka 2019)

Analisis data lokasi fokus (Lokus Penelitian) dari Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban hanya 5 (lima) Desa karena Desa tersebut masuk dalam Ring 1 yang terdampak dalam proses pembangunan kilang PT. Pertamina.

Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak Jenu

Jumlah penduduk Desa Ring 1 Pembangunan Kilang Minyak Jenu

Jumlah Penduduk 5 Desa di Kecamatan Jenu				
No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (laki-laki)	Jumlah Penduduk (Perempuan)	Jumlah KK
1	Mentoso	1405 jiwa	1414 jiwa	869 KK
2	Wadung	1397 jiwa	1344 jiwa	822 KK
3	Kaliuntu	1323 jiwa	1293 jiwa	781 KK
4	Sumurgeneng	1691 jiwa	1764 jiwa	992 KK
5	Rawasan	1526 jiwa	1468 jiwa	883 KK

(Data dari Kecamatan Jenu)

Keterangan dari persebaran dan kepadatan penduduk pada Ring 1 di bagi 2 kategori yakni jumlah laki-laki dan perempuan. Kemudian dijumlah dalam satu keterangan yakni jumlah Kartu Keluarga (KK).

Tabel 3. Jumlah Berdasarkan Jenis Agama 5 Desa di Kecamatan Jenu

Jumlah Berdasarkan Jenis Agama 5 Desa di Kecamatan Jenu

Jumlah Berdasarkan Jenis Agama 5 Desa di Kecamatan Jenu							
No	Nama Desa	Islam	Kristen	Katholik	Hindu	Budha	Konghucu
1	Mentoso	2819 jiwa	0	0	0	0	0
2	Wadung	2740 jiwa	0	1 jiwa	0	0	0
3	Kaliuntu	2616 jiwa	0	0	0	0	0
4	Sumurgeneng	3453 jiwa	2 jiwa	0	0	0	0
5	Rawasan	2994 jiwa	0	0	0	0	0

(Data dari Kecamatan Jenu)

Keterangan dari persebaran jumlah berdasarkan jenis agama dijelaskan dengan 6 kategori agama yakni Islam; Kristen; Katholik; Hindu; Budha dan Konghucu. Hasil dari data menjelaskan bahwa dominan pada jenis agama yang di anut adalah Islam. Sedangkan untuk agama lainnya hanya Kristen berjumlah 2 jiwa dan Katholik berjumlah 1 jiwa.

Tabel 4. Potensi Mata Pencanharian 5 Desa di Kecamatan Jenu

Potensi Mata Pencanharian 6 Desa di Kecamatan Jenu						
No	Nama Desa	Pengurus Rumah Tangga	Petani/ Perkebunan	Nelayan/ Perikanan	Karyawan Swasta	Wiraswasta
1	Mentoso	733 jiwa	375 jiwa	129 jiwa	122 jiwa	427 jiwa
2	Wadung	273 jiwa	437 jiwa	6 jiwa	170 jiwa	403 jiwa
3	Kaliuntu	506 jiwa	350 jiwa	200 jiwa	122 jiwa	392 jiwa
4	Sumurgeneng	204 jiwa	1578 jiwa	3 jiwa	193 jiwa	439 jiwa
5	Rawasan	451 jiwa	604 jiwa	6 jiwa	54 jiwa	876 jiwa

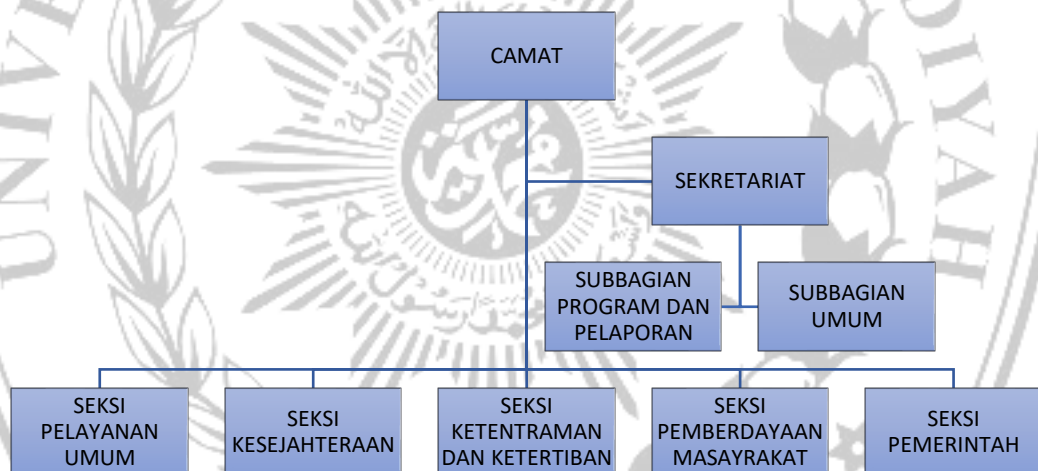
(Data dari Kecamatan Jenu)

Keterangan potensi mata pencaharian 5 desa di Kecamatan Jenu dikategorikan 5 (lima) rata-rata jumlah terbanyak dalam data potensi mata pencaharian untuk meringkas keseluruhan pada tahun 2019. Keterangan ringkasan dari 5 potensi yang ada yakni pengurus rumah tangga; petani/perkebunan; nelayan/perikanan; karyawan swasta dan wiraswasta.

Kondisi Sosial dan Budaya

Kondisi sosial masyarakat 5 Desa terdampak pembangunan di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban memiliki solidaritas tinggi, karena masyarakat dalam kelompok desa yang memiliki solidaritas mekanik. Solidaritas yang kolektifitas tinggi dalam kesadaran sosial satu sama lain. Kondisi budaya dari masyarakat desa yang terdampak pembangunan karena dominan sebagai petani dan berkebun, mereka mementingkan budaya turun temurun keluarganya agar meneruskan mata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Selain itu, masyarakat berkomitmen agar mementingkan kelestarian lahan hijau pertanian dan perkebunan untuk kesejahteraan kehidupan masyarakat sehari-hari.

Bagan struktural dan visi misi Kecamatan Jenu



Gambar 5. Bagan Susunan Organisasi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban.

Nama-nama Pejabat dalam Struktur Organisasi:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) Camat | : Moh. MAftuchin Riza, S.Stp., M.M. |
| 2) Sekretaris Camat | : Suwarno, S.Stp |
| 3) Kasubbag Program dan Pelaporan | : Solikin, S.H. |
| 4) Kasi Pemerintahan | : Wartini, S.E. |
| 5) Kasi Pemberdayaan Masyarakat | : Zaenul Arifin, S.H. |
| 6) Kasi Ketentraman dan Ketertiban | : Wisamayo |
| 7) Kasi Kesejahteraan | : Jasmadi, S.H. |
| 8) Kasi Pelayanan Umum | : Edi Sumali |

Motto, Visi dan Misi Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Motto : Keramahan; Kesantunan dalam Pelayanan

Visi : Mewujudkan pelayanan masyarakat yang cepat, sederhana, transparan dan pasti.

Misi :

- Menciptakan kemudahan pelayanan kepada masyarakat
- Menciptakan pelayanan yang transparan, konsisten, nyaman dan aman.

Nama Kepala Desa yang Desa masuk dalam Ring 1 Kilang Minyak:

1. Kepala Desa Rawasan : (pasif pergerakan resistensi)
2. Kepala Desa Kaliuntu : (pasif pergerakan resistensi)
3. Kepala Desa Mentoso : (pasif pergerakan resistensi)
4. Kepala Desa Wadung : (aktif pergerakan resistensi)
5. Kepala Desa Sumurgeneng : (aktif pergerakan resistensi)

Keputusan AMDAL dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah

a. Keputusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Tahun 2017

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.463/Menlhk/Sekjen/PLA.4/9/2017 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Pembangunan dan Pengoperasian Kilang Pertamina-Rosneft Terintegrasi BBM dan Petrokimia beserta Fasilitas Penunjangnya Di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Kepada PT. Pertamina (Persero).

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.464/Menlhk/Setjen/PLA.4/9/2017, tentang Izin Lingkungan Kegiatan pembangunan dan pengoperasian kilang pertamina-rosneft terintegrasi BBM dan Petrokimia beserta fasilitas penunjangnya di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur Kepada PT. Pertamina (Persero).

“Keterangan dalam 2 (dua) keputusan perijinan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) disahkan pada tanggal 6 September 2017 berlokasi di Jakarta. Total pembuatan dan penyelesaian ijin AMDAL yakni 75 hari akan tetapi bisa melebihi target karena metode penelitian untuk perijinan bisa melebar dan menambah durasi waktu observasi.” (DLH Kab. Tuban)

Keputusan ini berisikan dengan ijin jumlah lahan 404 Hektar. Perijinan AMDAL bersama konsultan bernama PT. Grencap NAA Indonesia (0014/LPJ/AMDAL-1/LRK/KLH). Ruang lingkup AMDAL antara lain: Sosial dan Ekonomi; Kualitas Udara; Kualitas Air; Kebisingan; Keamanan, Kesehatan, Keselamatan Kerja (K3); Kesehatan Masyarakat;

Transportasi; dan Hidro-Oseanografi. Keterangan ijin AMDAL ini meliputi aktifitas fisik perusahaan dan untuk kegiatan penghitungan lahan yang akan digunakan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah diperbolehkan dan itu sah karena kegiatan tidak termasuk kegiatan fisik perusahaan. Ijin AMDAL akan diperbarui apabila luas lahan yang akan digunakan perusahaan bertambah, maka perusahaan harus membuat kembali ijin AMDAL yang baru.

b. Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Tahun 2019

Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/23/KPTS/013/2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Setelah Keputusan Gubernur sudah turun maka dibuatlah skema Pelaksanaan Pengadaan Tanah (PPT) untuk membuat jadwal dalam memproses skema pelaksanaan pengadaan tanah proyek Kilang Minyak.

Tabel 5. Alur Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban

Skema Pelaksanaan Kilang Minyak PT. Pertamina		
1	Penyiapan Administrasi	Maret 2019
2	Penyuluhan (Sosialisasi) 3 Desa: Wadung, Sumurgeneng, dan Kaliuntu	Maret 2019
3	Pemasangan Tugu Batas Tanah	Maret 2019
4	Inventarisasi dan Identifikasi Data Fisik Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemfaatan (Satgas A)	Maret 2019 - Mei 2019
5	Inventarisasi dan Identifikasi Data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah (Satgas B)	April 2019 - Mei 2019
6	Pengumuman Hasil Satgas A dan Satgas B	Juni 2019 - Juli 2019
7	Surat kepada PT. Pertamina perihal Penunjukan Appraisal	Juli 2019
8	Penetapan Appraisal	Agustus 2019
9	Penilaian oleh Appraisal	September 2019
10	Penyerahan Hasil Penilaian dari Appraisal	Oktober 2019
11	Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian	Oktober 2019
12	Pembayaran Ganti Kerugian	November 2019 - Selesai

(Sumber: Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, 05 Maret 2019)

Tabel 6. Luas Penggunaan Lahan Pembanguna Kilang Minyak Kecamatan Jenu

No	Desa	Target	
		Bidang	Luas (m2)
1	Kalintu	6	12.856
2	Wadung	562	1.594.345
3	Sumurgeneng	566	2.225.306
4	Perhutani (Sumurgeneng)	1	1.105.068
5	KLHK (Mentoso, Rawasan,)	1	3.480.000
Jumlah		1136	8.417.575 (841 ha)

(sumber data: Badan Pertanahan Nasional Tuban, pada 19 Mei 2020)

Penggunaan lahan yang ikut serta dalam lahan milik masyarakat adalah 3 Desa yakni, Kaliuntu, Wadung, dan Sumurgeneng. Sedangkan untuk lahan 2 Desa lagi masuk dalam 1 lahan milik KLHK. Selain itu, ada juga lahan milik perhutani yang digunakan yang berada di Desa Sumurgeneng. Keterangan perijinan AMDAL terbaru dengan jumlah luasan lahan 841 ha masih diproses untuk update perijinan AMDAL kedua. Progres perijinan AMDAL kedua bulan Juli 2020 masih dalam tahap konsultasi publik.

Hasil dan Pembahasan

Penyajian deskriptif penelitian disesuaikan dengan kerangka berfikir dalam teoritik Scott tentang proses pembangunan, faktor terjadinya resistensi dan model gerakan resistensi masyarakat dengan 2 kategori yakni terbuka dan tertutup.

Pembangunan kilang minyak dari PT. Pertamina bersama PT. Roffnet dari Rusia adalah pembangunan negara yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Selain meningkatkan pendapatan negara, pembangunan ini bertujuan untuk mengurangi pasokan impor minyak dalam negara. Memaksimalkan sumber daya minyak ini bisa menjadikan negara memiliki stok minyak lebih banyak. Pembangunan kilang minyak rencana mulai konstruksi pada tahun 2020 dan rencana mulai operasi pada tahun 2024-2025.

Pembangunan Kilang Minyak Jenu adalah proyek prioritas dalam bidang minyak dan gas. Proyek Prioritas Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban di tangani oleh Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). Mengingat kebutuhan bahan bakar dan upaya pencapaian ketahanan energi di dalam negeri, Indonesia membutuhkan pertumbuhan industri kilang minyak di dalam negeri. Dengan dibangunnya Kilang Minyak Tuban, diharapkan dapat meningkatkan penyediaan minyak mentah dan bahan bakar di Indonesia sehingga dapat menurunkan ketergantungan terhadap impor (KPPIP, 2019).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum bertujuan menyediakan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, negara dan masyarakat dengan tetap menjamin kepentingan hukum pihak yang berhak (Indonesia Patent No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012). Sedangkan, pengelolaan tanah untuk kepentingan umum melakukan pelaksanaan pembangunan berdasarkan kepentingan bersama

dalam negara yang tak lepas dari kebutuhan masyarakat secara umum agar lebih sejahtera.

Penyelenggaraan pengadaan tanah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Pasal 10 tahun 2012, menyebutkan bahwa Infrastruktur minyak, gas dan panas bumi adalah pembangunan untuk kepentingan umum salah satu dari 18 point, penjelasannya rinciannya bisa dilihat dari point (e) maka, Pembangunan Kilang Minyak Pertamina merupakan pembangunan infrastruktur yang menjadi ruang lingkup untuk kepentingan umum sesuai peraturan yang sah.

Undang-Undang Republik Indonesia No.2 pasal 11 poin (2) Tahun 2012. Dalam hal Instansi yang memerlukan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 adalah Badan Usaha Milik Negara, tanahnya menjadi milik Badan Usaha Milik Negara (Indonesia Patent No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012). Pembangunan Kilang minyak yang dilaksanakan di Jenu Kabupaten Tuban adalah pembangunan yang di usung oleh PT. Pertamina yang termasuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pada 10 Desember 1957, perusahaan tersebut berubah nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional, disingkat (Pertamina). Tanggal ini diperingati sebagai lahirnya Pertamina hingga saat ini (2020). Pada 1960, PT Permina berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN) Permina. Kemudian, PN Permina bergabung dengan PN Pertamina menjadi PN Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) pada 20 Agustus 1968 (Pertamina, 2020).

Riwayat pembentukan PT. Pertamina berawal dari tahun 1957 yang sebelumnya bernama PERMINA. Kemudian pada Tahun 1960 berubah status menjadi Perusahaan Negara (PN). Setelah itu pada tahun 1968 PN PERMINA menjadi Pertamina. Perusahaan Negara adalah Perusahaan Milik Negara yang saat ini menjadi Badan Usaha Milik Negara atau di sebut BUMN.

Dilihat dari manfaat minyak digunakan seperti dalam tabel. 7 pengelolaan minyak dan kegunaannya:

Tabel 7. Pengelolaan Minyak Dan Kegunaan

No.	Jenis Bahan Bakar	Rumah Tangga	Transportasi	Industri Kecil/ Hotel/Restoran	Industri	Pembangkit Listrik
1	Premium	-	√	-	-	-
2	Solar	-	√	√	√	√
3	Kerosene	√	-	√	√	-
4	Minyak Diesel	-	√	√	√	√
5	Minyak Bakar	-	-	√	√	√
6	Avgas	-	√	-	-	-
7	Avtur	-	√	-	-	-

(Kebijakan energi lingkungan, 2017: 302) Donny Yoesgiantoro, Depok: LP3ES

1. Kebutuhan rumah tangga, minyak disini diolah menjadi kerosene atau paraffin atau biasa disebut dengan minyak tanah untuk keperluan memasak oleh ibu rumah tangga.
2. Kebutuhan transportasi, minyak diolah menjadi 5 jenis yakni premium, solar, minyak diesel, avgas dan avtur. Jenis ini digunakan kendaraan roda 2, roda 4 sampai digunakan juga oleh kendaraan pesawat.
3. Kebutuhan industri kecil-besar/hotel/restoran, minyak diolah menjadi 4 jenis yakni Solar, kerosene, minyak diesel, dan minyak bakar. Kebutuhan ini untuk memudahkan bisnis UMKM maupun bisnis kuliner yang membutuhkan bahan untuk masak dan dibutuhkan juga pihak perhotelan.
4. Kebutuhan bidang pembangkit listrik, minyak digunakan dengan menggunakan 3 jenis minyak yaitu solar, minyak diesel, dan minyak bakar. Seluruh Negara sangat membutuhkan listrik untuk kehidupan sehari-hari maka minyak untuk pembangkit listrik yang digunakan adalah solar, minyak diesel dan minyak tanah.

Keterangan kebutuhan minyak untuk semua penjurur negara dengan berbagai sektor. Garis besar penjelasan keperluan minyak (Yoesgiantoro, 2017) merupakan kebutuhan kepentingan umum untuk semua kalangan masyarakat dengan berbagai sektor kebutuhan masyarakat dari keperluan rumah tangga, industry sampai transportasi.

Proses Penetapan Lokasi Kilang Minyak di Jenu Kabupaten Tuban

Penetapan lokasi pertambangan kilang minyak yang diusung oleh Pertamina dan Roffnet dari Rusia diagendakan dan mulai disketsa pada tahun 2019. Penetapan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/23/KPTS/013/2019 tanggal

10 Januari 2019 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kilang Minyak di Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur.

Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Tuban akan menggunakan konfigurasi petrokimia (terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama), kilang minyak Tuban adalah proyek pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari yang akan dibangun di Tuban, Jawa Timur (KPPIP, 2019). Pengelolaan yang dilakukan Pertamina yakni pendanaan, penyusunan *Outline Business Case* (OBC), penetapan skema pendanaan, penetapan lokasi, akuisisi lahan, dan pelelangan investor. Status kemajuan proyek pada tahun 2015 terhitung pelaksanaan dalam presentase yakni 50% sudah terlaksana. Kemudian, pada Tahun 2017 terhitung pelaksanaan dalam presentase yakni 73,7% sudah terlaksana.

Perencanaan pihak Pertamina pada tahap Rencana Aksi berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yakni melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian terkait dalam pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan tersebut. Kementerian tersebut adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) terkait pemanfaatan lahan untuk pembangunan kilang minyak yang berada di Jenu Kabupaten Tuban. Selain itu, dalam pelaksanaan juga melakukan *Debottlenecking* terkait permasalahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada lahan yang akan dilakukan pembangunan kilang minyak dan perihal perpipaian.

Status perkembangan proyek dari Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yakni pada tahun 2019 perihal tahap transaksi. Tahap saat ini dilakukannya yakni seleksi *licensor* dan *General Engineering Design (GED) contractor*. Kemudian tahap proses kasasi putusan PTUN Surabaya yang melakukan pencabutan SK Gubernur Jawa Timur perihal Penetapan Lokasi proyek Kilng Minyak telah dimenangkan oleh Pertamina.

Skema perencanaan Pertamina yang diberikan Badan Pertanahan Nasional Tuban yakni Bulan Maret 2019 – November 2019. Tahap Penyiapan Administrasi, diterbitkan Surat Keputusan Penetapan Lokasi Kilang yang diberikan oleh Gubernur Jawa Timur. Kemudian diterbitkannya Surat Keputusan perihal penunjukan Kepala Perlaksana oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanhan Nasional Jawa Timur. Disusulnya surat keputusan anggota pelaksana dan sekretaris pengadaan tanah kilang minyak. Penyiapan administrasi juga melakukan koordinasi dengan semua instansi yang masuk dalam keanggotaan pelaksanaan.

Tahap Penyuluhan atau sosialisasi. Penyuluhan atau sosialisasi dilaksanakan di kecamatan Jenu dan dilaksanakan tanya jawab serta pemaparan terkait penetapan lokasi Kilang Minyak Jenu disampaikan hal-hal yang diberikan ganti kerugian dalam pengadaan tanah. Penyuluhan diberikan untuk desa yang terdampak pembangunan tersebut, yakni: Desa Wadung, Sumurgeneng, Kaliuntu, Mentoso, dan Rawasan.

Tahap Pemasangan Tugu Batas Tanah. Pemasangan dilakukan oleh orang yang berhak dengan disaksikan tetangga batas bidang tanah dan oleh perwakilan

dari PT. Pertamina. Pemasangan dilakukan dalam memudahkan pengukuran keseluruhan dan bermanfaat untuk penugasan selanjutnya.

Tahap Penugasan Satgas A. Inventarisasi dan identifikasi data fisik penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (Indonesia Patent No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012). Ruang lingkup Satgas A adalah Pengukuran dan Pemetaan Bidang-Bidang. Inventarisasi yang dilakukan pengukuran bidang perbidang tanah sesuai dengan penunjukan yang telah di pasang tanda batas (patok) oleh yang punya tanah dengan persetujuan tetangga batas dan disaksikan oleh perangkat desa maupun dari perwakilan PT. Pertamina.

Tahap Penugasan Satgas B. Inventarisasi dan identifikasi data pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah. Satgas B penugasan dengan melakukan inventarisasi terkait data subjek dan objek bidang tanah yang meliputi nama, alas hak, data tanaman musiman atau tahunan dan bangunan. Ringkasnya penugasan Satgas B adalah identifikasi jenis tanah. Satgas B melakukan pelaksanaan dengan Dinas-Dinas terkait yakni Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Tuban, Dinas Pertanian Tuban, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tuban. Tugas dari Dinas Pertanian adalah membantu mengidentifikasi jenis tanaman yang berada di tanah tersebut atau ikut dalam penggantian lahan. Dinas PUPR bertugas dalam mengidentifikasi jenis bangunan permanen maupun semi permanen yang berdiri di lahan tersebut. Kepala Bagian Pemerintah Kabupaten Tuban perwakilan dari pihak Kabupaten Tuban.

Tahap Pengumuman Hasil Satgas A dan Satgas B. Pengumuman hasil inventarisasi dan identifikasi dari Satgas A dan Satgas B diumumkan di Balai Desa dan diberitahukan yang bersangkutan oleh pihak Desa kepada pemilik tanah. Pengumuman ini dilakukan 14 hari kerja untuk mengumumkan keduanya dari Satgas A dan Satgas karena keduanya adalah satu kesatuan dalam lembar penugasan. Pengumuman ini diberikan catatan apabila pihak warga pemilik lahan keberatan dengan identifikasi dari Satgas A dan Satgas B.

Tahap Penyuratan Kepada PT. Pertamina perihal penunjukan Appraisal. Tujuan pengiriman surat kepada PT. Pertamina adalah agar PT. Pertamina segera menunjuk Appraisal yang akan ditugasi oleh PT. Pertamina dalam melakukan tahap selanjutnya. Appraisal adalah Kantor Jasa Penilai Publik yang bertugas menilai ganti rugi lahan.

Tahap Penetapan Appraisal. Penetapan Appraisal diberikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan penunjukan Appraisal dari Badan Pertanahan Nasional Tuban. Setelah PT. Pertamina menunjuk Appraisal, pihak Badan Pertanahan Nasional akan menyurati pihak Appraisal yang ditunjuk oleh PT. Pertamina. Setelah penunjukan pihak appraisal, pihak Badan Pertanahan Nasional Tuban akan memberikan berkas dari identifikasi Satgas A dan Satgas B kepada Appraisal tersebut.

Tahap Penilaian oleh Appraisal. Penilaian dilakukan berdasarkan pengumuman hasil inventarisasi dari Satgas A dan Satgas B yang dilakukan secara bidang per bidang dengan melalui metode penilaian lapangan. Penugasan yang diberikan Appraisal oleh Badan Pertanahan Nasional Tuban dengan durasi penilaian 30 hari kerja harus selesai.

Tahap Penyerahan Hasil Penilaian dari Appraisal. Penyerahan penilaian total nilai wajar setelah dilakukan inspeksi lapang diserahkan kepada Ketua

Pelaksana Pengadaan Tanah Badan Pertanahan Nasional Tuban. Kemudian Badan Pertanahan Nasional Tuban melakukan verifikasi data yang diterima dari pihak Appraisal.

Tahap Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian. Musyawarah dilaksanakan dengan menghadirkan yang berhak atau yang diberikan kuasa dengan melaporkan hasil total nilai wajar dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diikuti dan disaksikan semua anggota pelaksana pengadaan tanah. Musyawarah penetapan ganti rugi ini dibedakan menjadi 2 materi yakni menyampaikan bentuk ganti kerugian dan memaparkan nilai ganti kerugian. Penyampaian bentuk ganti kerugian memiliki 2 hal yaitu bentuk ganti dengan uang dan bentuk ganti dengan tanah pengganti (relokasi). Kemudian di dalam lembar informasi musyawarah diberikan 2 opsi yaitu setuju atau tidak setuju yang dicantumkan pada lembar berita acara kesepakatan.

Tahap Pembayaran Ganti Kerugian. Pembayaran ganti kerugian diberikan dengan melakukan pembuatan berita acara pelimpahan hak dan pembayaran ganti kerugian diberikan dalam bentuk uang atau tanah pengganti (relokasi). Tahap Pembayaran masih berlangsung dari sketsa pelaksanaan sampai sekarang dan masih 70 bidang yang belum terselesaikan dari total 1136 bidang.

Faktor Terjadinya Perlawanan/Resistensi Masyarakat

Fenomena pembangunan yang masih menjadi problem masyarakat seperti pembangunan Mega Proyek PT. Pertamina di Kawasan Jenu Kabupaten Tuban menuai gelombang karena sosialisasi awal tidak sepenuhnya menyentuh langsung kepada masyarakat yang terdampak dalam proses pembangunan kilang. Gejolak emosi dan rasa ketidaksesuaian yang dirasakan oleh masyarakat sekitar menjadikan individu maupun kelompok melakukan resistensi untuk bertujuan menolak pembangunan yang merugikan masyarakat yang akan terdampak dalam pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina.

Faktor-faktor penolakan masyarakat memiliki arti keadaan yang mempengaruhi dan menyebabkan terjadinya masyarakat melakukan tindakan penolakan agar dapat merubah keadaan dan proses pembangunan kilang minyak Jenu Kabupaten Tuban dibatalkan kemudian hal ini menjadikan fenomena perubahan sosial. Banyak faktor-faktor masyarakat melakukan tindakan resistensi yakni dari individu maupun kelompok masyarakat. Resistensi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk membatalkan pembangunan mega proyek kilang minyak PT. Pertamina (persero) bersama Rosneft dari Rusia. Tindakan dilakukan dimulai individu yang memiliki sebuah ideologi sampai tindakan bersifat kepentingan kelompok petani maupun tak terkecuali kepentingan politik. Akan tetapi, ketakutan dan keresahan masyarakat yang terdampak dalam pembangunan kilang yakni tidak disejahterakan dan kemudian hak-hak bertani mereka di rampas secara paksa tanpa ada *feedback* yang *balance*.

Faktor-faktor masyarakat melakukan penolakan beranekaragam. Pertama, faktor ancaman perekonomian masyarakat yang akan berubah berawal dari bertani dan masyarakat tidak bisa mencari mata pencaharian terbaru sebagai penggantinya karena lahan pertanian digunakan sebagai pembangunan kilang minyak. Selain itu,

faktor adanya ideologi masyarakat yang meerkat dalam diri bahwa lahan pertanian yang sudah diturun temurunkan dari keluarganya harus dikelola tanpa harus menjualnya. Faktor berikutnya, faktor keterlibatan keikutsertaan pihak di luar (komunitas dan pihak hukum) dari petani maupun pemilik lahan yang akan digunakan pembangunan oleh PT. Pertamina. Selain itu, ada faktor yang bisa menjadi gerakan penolakan terjadi, yakni adanya eksistensi politik dalam aksi gerakan resistensi terhadap kepentingan partai politik tertentu.

Ancaman Perekonomian Masyarakat

Faktor penolakan masyarakat dalam menolak pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Jenu Tuban salah satunya masyarakat memikirkan segi perekonomian masyarakat yang lahannya terdampak pembangunan. Contohnya aspek harga dari lahan yang akan dibeli oleh PT. Pertamina. Menurut Pak Kades Desa Wadung, ada alasan mengapa masyarakat menolak yaitu karena masyarakat memikirkan harga lahan dibeli dengan harga murah.

“Masyarakat menolak pembangunan karena masyarakat ingin menaikan perekonomian masyarakat bukan dengan menjual lahan dengan harga murah. Kabar burung atau gossip itu tersebar di lingkungan masyarakat yang terdampak pembangunan Pertamina” (Kades Wadung).

Keterangan dari Pak Kades membuktikan bahwa masyarakat menolak karena masyarakat ingin meningkatkan perekonomian agar lebih sejahtera, bukan dengan lahannya yang akan dibeli oleh PT. Pertamina dengan murah. Ketakutan inilah membuat masyarakat melakukan penolakan karena masyarakat belum diinformasikan harga oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban di tambah lagi banyak kabar burung yang tersebar di masyarakat terdampak pembangunan.

“Dulu masalah harga, masih katanya-katanya belum *deal*. Dulu waktu demo di kantor kecamatan katanya 2000/2jt, 1 meter, kataya”. (kutipan wawancara 4 warga dari media youtube Tuban Darurat Agraria).

Ditunjang dengan pernyataan dari 4 warga yang diperoleh dari dokumentasi youtube oleh Tuban Darurat Agraria. Bahwa masyarakat menimbang masalah harga yang belum menemui kesepakatan harga. Masyarakat sendiri masih mendengar isu harga “katanya-katanya” hal inilah yang membuat masyarakat memanas dan bergejolak melakukan aksi penolakan pembangunan PT. Pertamina karena ketakutan masyarakat akan nilai jual lahan diberikan harga murah dan membuat masyarakat semakin tertindas dan miskin.

“Adanya tuntunan masyarakat kepada PT. Pertamina di luar kegiatan pengadaan tanah yang belum disepakati (tuntutan untuk dipekerjakan di proyek kilang minyak dan beasiswa untuk anak-anak sekolah, jaminan kesejahteraan).” (laporan kendala sosialisasi pertama di Desa Sumurgeneng bulan Agustus 2019 dari BPN Tuban).

Kendala yang tercatat dalam laporan sosialisasi pertama di Bulan Agustus 2019 oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban, terdapat beberapa kendala

yakni tuntutan masyarakat tentang jaminan sosial-ekonomi. Tuntutan masyarakat sumurgeneng yakni permintaan kesepakatan permintaan lowongan pekerjaan dari pihak desa terdampak, permintaan beasiswa untuk anak-anak sekolah dan kesejahteraan masyarakat yang terdampak (Ring 1) pembangunan Pertamina agar diprioritaskan sosial-ekonomi masyarakat.

“Sebagian masyarakat desa sumurgeneng takut tidak bisa mencari nafkah lagi karena profesi mereka hanya petani dan tidak mempunyai keahlian lain, sehingga apabila lahan mereka dibeli Pertamina mereka akan kesulitan mencari nafkah.” (Laporan kendala sosialisasi kedua di Desa Sumurgeneng bulan Agustus 2019 dari BPN Tuban).

Laporan kedua dari kendala sosialisasi di Desa Sumurgeneng di Bulan Agustus 2019 dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban yakni ketakutan masyarakat karena profesi masyarakat hanya petani dan kesulitan mencari nafkah ditengah pembangunan Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban.

Pemikiran ancaman dalam hal segi perekonomian juga dijelaskan pada petani yang memiliki lahan dan sudah menyetejui. Menurut Mas AA (nama yang disamarkan) petani dari Wadung.

“yang mempunyai lahan 1 saja yang ngeyel menolak. Kecuali yang mempunyai lahan lebih dari 1. Mereka pasti setuju dengan harga yang ditawarkan ganti lahan tersebut sangat menguntungkan lebih dari harga normal.” (salah satu petani Wadung, Mas AA)

Melihat dari permasalahan petani yang dijelaskan Mas AA, secara umum petani yang menolak adalah orang yang memiliki lahan 1 saja dan masih memikirkan harga. Diharapkan ada harga khusus yang hanya memiliki 1 lahan. Harapan harga yang lebih tinggi menjadikan keuntungan perekonomian dalam kepentingan pribadi pemilik lahan tersebut.

Ideologi Masyarakat dalam Aksi Perlawanan

Faktor penolakan masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak oleh Pertamina yang kedua adalah adanya ideologi masyarakat yang masih melekat dan ingin dilestarikan kepada anak cucunya untuk bertani. Data sekunder dari video youtube Tuban darurat Agraria, mencantumkan seorang warga Jenu yang terdampak pembangunan yang memiliki cara mempertahankan lahannya.

“uwong sing intuk duwik milayaran teko ngedol tanahe, duwike sediluk entek. Emoh kaulat, tinggalan wong tuo lak iso di rumat, dikekno anak e gak usah di dol. Amanati orang tua, ditinggali tanah dirawat jangan di jual. Pihak perusahaan memaksa untuk membeli tanah disini, tapi tetep kekeh kapanpun tidak akan saya jual.” (kutipan wawancara 1 warga dari media youtube Tuban Darurat Agraria).

Maksud dari penjelasan tersebut adalah masyarakat yang mendapatkan uang banyak dari menjual tanah, maka uang tersebut akan cepat habis. Beliau juga mengatakan Pamali bila lahan peninggalan orang tua dijual lebih baik di rawat dan digunakan sendiri untuk diwariskan kepada anaknya. Amanah dari orang tua bahwa

tanah ini diberikan untuk dirawat bukan di jual. Pihak Pertamina bila memaksa maka beliau tetap tidak akan menjualnya.

“tanah di Jenu adalah tanah produktif, subur gemah limpah lohjinawe. Pertanian diwilayah kami jangan di rubah, hanya untuk pertanian, hidup petani!!! (warga ketika melakukan aksi di gedung DPRD, kutipan rekaman dari media youtube Tuban Darurat Agraria)

Dokumentasi kedua juga Ketika masyarakat melakukan aksi di kantor DPRD Kanupaten Tuban yang menjelaskan bahwa tanah terdampak pembangunan Kilang minyak adalah tanah produktif yang masih kaya raya dengan kesuburannya. Masyarakat menginginkan pertanian tersebut jangan di rubah biarkan sebagai lahan pertanian.

“Ibu Merona (nama disamarkan) membangun ruang yang bernama “lahan bersama” di samping rumah untuk menanam bersama tetangga sekitar. Ibu Merona menyadarkan untuk menanam warga. Ayo mandiri menanam untuk sendiri tidak usah menunggu bantuan dari pemerintah. Dan komunitas Tuban Darurat Agraria adalah komunitas yang bergerak membela masyarakat yang tertindas dan lahannya yang direbut oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Alasan ikut adalah Tuban Darurat Agraria merangkul komunitas atau relasi yang sebidang atau seideologi yang bergerak dipermasalahan lingkungan.” (penjelasan Kak NJ nama disamarkan salah satu dari Komunitas).

Penjelasan dari Kak NJ (nama yang disamarkan) salah satu komunitas yang memiliki ideologi dalam ikut menolak pembangunan Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban. Menurut beliau ada aktor individu dalam menyadarkan masyarakat lain dan ada juga komunitas yang memiliki ideologi yang sama yakni terjun dalam permasalahan lingkungan dan menolak penindasan petani karena pembangunan Pertamina. Kak NJ menjelaskan aktor individu ini adalah Ibu Merona (nama yang disamarkan) melakukan penyadaran kepada masyarakat bahwa menanam adalah aksi mandiri untuk menyejahterakan diri menambah perekonomian. Kemudian, adanya Tuban Darurat Agraria bergerak membela masyarakat yang tertindas karena lahannya digunakan sebagai pembangunan kilang minyak PT. Pertamina. Tuban Darurat Agraria juga menggandeng beberapa komunitas yang memiliki ideologi yang sepemahaman organisasi mereka yakni dibidang pelestarian lingkungan dan permasalahan lingkungan.

“Masyarakat desa Sumurgeneng beranggapan bahwa tanah pertanian di desa tersebut subur dan tidak cocok untuk kilang minyak”. (Laporan kendala sosialisasi di Desa Sumurgeneng bulan agustus dari BPN Tuban).

Laporan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban menjelaskan masyarakat melakukan penolakan karena masyarakat memiliki ideologi bahwa tanah di Sumurgeng subur dan tidak cocok untuk dibangunnya pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban.

Keterlibatan Volunteerisasi Aksi dalam Gerakan Resistensi

Faktor lain masyarakat melakukan penolakan terhadap pembangunan kilang minyak oleh PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban yakni adanya keterlibatan volunteerisasi dalam melakukan aksi gerakan resistensi/penolakan yang bertujuan menambah jumlah kelompok yang menolak dan menjadikan kekuatan tambahan suara untuk menyuarakan penolakan pembangunan kilang minyak.

“Warga asli yang sebagai massa menolak sedikit, lebih banyak warga yang ikut-ikutan dan banyak dari pihak lain. Massa ada juga dari pencinta lingkungan. Masyarakat ikut menolak karena masyarakat tidak mempunyai ideologi. Masyarakat lebih banyak ikut-ikutan saja.” (Kades Sumurgeneng)

Penjelasan dari Kades Sumurgeneng, warga asli Sumurgeneng yang menolak Pertamina sedikit dan warga hanya sekedar ikut-ikutan. Sedangkan jumlah yang banyak dari pihak lain yang bukan asli warga Sumurgeneng. Contohnya adanya komunitas pencinta lingkungan. Warga dari Sumurgeneng tidak mempunyai ideologi untuk menolak karena lebih banyak ikut-ikutan (adanya profokasi).

“Yang berkolaborasi dengan Tuban Darurat Agraria bareng mas Ye yang memang sebelumnya adalah mahasiswa pecinta alam di kampus Tuban. Ada musisi dari Madura yang ikut melakukan aksi dan sering berkeliling di lingkungan konflik. Dan merangkul solidaritas dengan komunitas membaca se Indonesia (nama yang disamarkan) di berbagai Indonesia tak terkecuali di komunitas membaca Tuban.” (penjelasan Kak NJ nama disamarkan salah satu dari Komunitas).

Beberapa pihak lain menurut Kak NJ yang ikut dalam penolakan yakni dari Tuban Darurat Agraria, mas Ye (nama yang disamarkan) mahasiswa di Tuban, musisi dari Madura yang sering berkeliling di area konflik lingkungan, dan merangkul komunitas membaca (nama yang disamarkan). Pihak lain diharapkan menjadikan kekuatan tambahan dalam menguatkan penolakan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban.

“Massa banyak dari masyarakat orang diluar warga wadung. Adanya juga LSM dari luar yang ikut menolak. Ada beberapa organisasi mahasiswa yang ikut berjuang.” (Kades Wadung)

Ditambah juga penjelasan dari Kades Wadung bahwa ketika penolakan terjadi banyak warga diluar wadung yang ikut serta kemudian disusul beberapa LSM dan organisasi mahasiswa dalam aksi penolakan. Menurut petani dari Wadung, Mas AA (nama yang disamarkan) menjelaskan adanya pihak luar yang ikut serta.

“orang luar mempengaruhi penolakan tapi tidak akan berpengaruh bila orang non Jenu itu tidak mempunyai bekal ilmu hukum. Menjadi percuma keikutsertaannya.” (Mas AA, Petani Wadung)

Mas AA menjelaskan bahwa keikutsertaan diluar Jenu akan menjadi tidak membantu apabila tidak ada landasan fikiran hukum karena keikutsertaan akan menjadi percuma dan tidak ada kekuatan didalam kelompok penolakan warga Jenu yang menolak pembangunan kilang minyak PT. Pertamina.

Eksistensi Politik dalam Aksi Gerakan Resistensi Masyarakat

Faktor terakhir dari adanya penolakan adalah adanya eksistensi politik dalam aksi gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang PT. Pertamina Jenu Kabupaten Tuban. Eksistensi politik yang mencari celah di waktu pemilihan serentak tahun 2019.

“Trandensi buka hati dari hati tapi adanya profokator. Penolakan di mulai 2019-sekarang. 2019 rame ramenya politik (pemilihan serentak). Dengan adanya gejolak penetapan lokasi ada beberapa oknum yang memakai waktu ini untuk celah mencari massa politiknya.” (Kades Wadung)

Menurut Kades Wadung, penolakan yang ada di Pertamina Jenu karena ada trandesi gerakan tersebut adalah gerakan yang dinaungi sebuah perpolitikan. Menurut beliau tahun 2019 adalah tahun pemilihan yang serentak dan mempunyai kepentingan politik. Profokator penolakan bersamaan dengan pemilihan serentak di tahun 2019. Momen gejolak penetapan lokasi ini menjadikan celah eksistensi politik mencari massa.

“Sempat Pak Kades ditemukan oleh tokoh penolak tapi Pak Kades tidak mau karena adanya hal perpolitikan dan keadaan itu Pak Kades belum menjabat sebagai Pak Kades.” (Kades Sumurgeneng).

Pak Kades Sumurgeneng menjelaskan bila hamper undangan dari tokoh penolakan, akan tetapi Pak Kades tidak ingin menghadiri karena adanya kepentingan politik yang ingin dibicarakan selain itu Pak Kades Sumurgeneng juga belum menjabat menjadi Kepala Desa. Fenomena keikutan campur perpolitikan yang menjadikan penolakan masyarakat merangkul banyak orang karena adanya kepentingan didalamnya.

“Ada dibelakang layar perpolitikan yang ikut serta tapi tidak terlihat.” (penjelasan Kak NJ nama disamarkan salah satu dari Komunitas).

Eksistensi politik ini tidak tansparan karena menurut penjelasan dari Kak NJ adanya perpolitikan yang ikut serta akan tetapi tidak terlihat. Artinya, perpolitikan melakukan eksistensinya dengan bermain di belakang layar yang kemudian tidak terlihat oleh kalangan umum bahwa oknum politik secara tidak alngsung ikut secara dalam mencari momen dalam penolakan pembangunan kilang minyak Pertamina di Tuban.

“Oknum politik pasti ada, tapi saya tidak mau menyebutkan. Oknum itu mereka bermain dibalik layer. Didepan merek amenunjukkan penolakan tapi dibelakang oknu itu bermain politik.” (Mas AA, Petani Desa Wadung)

Keterlibatan oknum politik menunjukan penolakan untuk mengambil simpati warga dalam arti untuk mengambil suara kepercayaan warga kepada oknum

tersebut. Akan tetapi, dibalik itu oknum setuju dengan pembangunan kilang minyak. Keterlibatan oknum politik ini karena faktor pemilihan serentak 2019. Keterlibatan pengambilan hati untuk memperoleh suara sangat tinggi. Celah tersebut yang menjadikan eksistensi politik masuk dalam penolakan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban.

Informasi media sebagai *Track Record* terhadap Proses Pembangunan Kilang Minyak Jenu Kabupaten Tuban pada 2019-2020 adalah data sekunder dalam mendeskripsikan problem dan proses pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban.

“*Track Record* bisa dilihat di media online karena dulu ketika pihak intel turun media juga mengekspose kegiatan penolakan dan segala aktifitas di area Jenu tentang Pembangunan Kilang Minyak Pertamina di Jenu.” (Pihak Intel dari Polres Tuban)

Pada 2019-2020 adalah skema pengelolaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban yang kemudian diringi dengan munculnya gejolak pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban. Informasi dari media online menurut pihak Inteligensi Polres Tuban bisa menjadi tambahan data penolakan pembangunan Pertamina karena pihak intel tidak bisa mengekspose data dari Polres yang bersifat privasi negara.

Eksistensi politik menjadi salah satu faktor terbentuknya gerakan sosial seperti teori gerakan sosial lama. Gerakan sosial, terbentuk ketika krisis politik muncul, dan didorong dengan kondisional masyarakat yang saat itu ada permasalahan kerusuhan di dalam masyarakat/ fenomena masyarakat berdasarkan problem (Sukmana, 2016, p. 92). Menurut Wahyudi (2005, p. 43), gerakan sosial memiliki komponen dalam menjelaskan tindakan kolektif untuk melakukan gerakan sosial. Komponen tindakan yakni kepentingan, organisasi, mobilisasi, peluang (*opportunity*), dan tindakan kolektif yang dibentuk. Pichardo dalam Sukmana (2016, p. 119), faktor utama karakteristik dari gerakan sosial baru adalah kacamata ideologi yang *difference* (tidak sama). Paradigma gerakan sosial baru memberikan penjelasan bahwa gerakan sosial kontemporer mewakili keputusan dari gerakan di era industrial.

Basis partisipan pada *new social movement* yakni adanya ideologi dalam kelompok, gerakan sosial bukan karena etnis, lingkup masalah sosial isu keagamaan, atau adanya *classes-based community* atau disebut juga komunitas berbasis kelas (Sukmana, 2016, p. 123). *Belief of society* bukan pengertian dalam lingkup nilai-nilai keregulitas kepercayaan masyarakat, akan tetapi digambarkan pada perilaku kepercayaan pada tindakan kolektif yang memiliki satu tujuan yang sama atau kepemilikan *interest* dalam lingkup kelompok (Wahyudi, 2005, p. 218). Tindakan represif dilakukan oleh pihak masyarakat kontra maupun pro terhadap pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Jenu, Tuban. Tindakan represif atau Kontrol sosial pada masyarakat menekankan pada sebuah tindakan dari pihak pro maupun kontra dalam problematika, selain itu juga melihat kondusifitas maupun nilai/norma masyarakat yang masih berlaku untuk melakukan tindakan *goal*

(Wahyudi, 2005, pp. 92-93). Tindakan kontrol sosial memiliki penjelasan bahwa tindakan kontrol sosial kearah untuk meminimalisir kerusakan atau tindakan konflik yang terjadi maupun penolakan secara anarkis yang merugikan banyak pihak (Wahyudi, 2005, p. 239).

Informasi Media sebagai *Track Record* pembangunan kilang minyak

Informasi media sebagai *Track Record* terhadap proses pembangunan kilang minyak Jenu Kabupaten Tuban mulai Januari 2019 - Juli 2020 adalah data sekunder dalam mendeskripsikan *problem* dan proses pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban. *Track record* adalah rekam jejak bukti media *online* atau berita *online* ketika permasalahan dilapangan terjadi aksi atau pernyataan beberapa pihak tentang proses pengadaan sampai penolakan masyarakat terhadap pembangunan PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban.

“*Track Record* bisa dilihat di media online karena dulu ketika pihak intel turun media juga mengekspose kegiatan penolakan dan segala aktifitas di area Jenu tentang Pembangunan Kilang Minyak Pertamina di Jenu.” (Pihak Intel dari Polres Tuban)

Pada 2019-2020 adalah skema pengelolaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh PT. Pertamina dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tuban yang kemudian diringi dengan munculnya gejolak pembangunan kilang minyak di Jenu Kabupaten Tuban. Informasi dari media online menurut pihak Inteligensi Polres Tuban bisa menjadi tambahan data penolakan pembangunan pertamina karena pihak intel tidak bisa mengekspose data dari polres yang bersifat privasi negara.

Track Record yang berdurasi selama 19 bulan dengan keterangan Januari 2019 sampai Juli 2020. *Track record* analisis yang diperoleh adalah penyajian kasus penunjang pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Jenu Kabupaten Tuban. Hubungan rekam jejak atau *track record* adalah sebagai bukti tambahan kejadian dilapangan ketika pihak PT. Pertamina dan masyarakat berseteru/berkonflik. Bukti dari rekam jejak media bisa digunakan sebagai data penunjang/sekunder untuk menganalisis kejadian konflik dari dua pihak yang sedang berseteru.



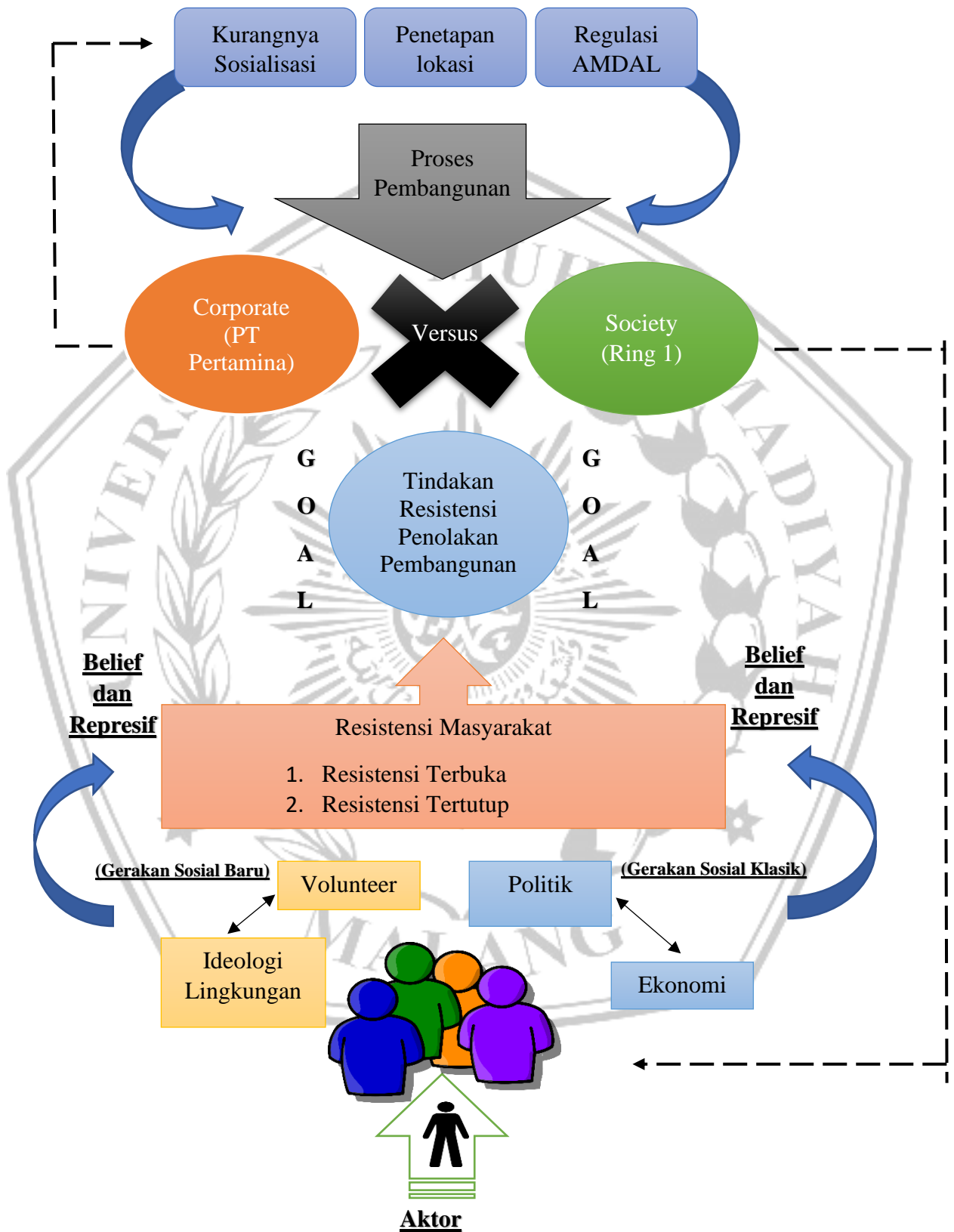
Gambar 6. Spanduk penolakan warga



Gambar 7. Spanduk warga tolak penetapan lokasi

Model Analisis Teori dan Model Resistensi Masyarakat

Gambar 8. Bagan Model Analisis Teori Gerakan Resistensi



Faktor perekonomian dan eksistensi politik sebagai gerakan sosial klasik

Gerakan resistensi masyarakat terhadap pembangunan kilang minyak yang dilakukan oleh masyarakat petani bisa digolongkan ke dalam tipe gerakan lama apabila gerakan ini didorong karena adanya faktor politik dan perekonomian yang menjadikan petani melakukan gerakan sosial yang bertujuan untuk melakukan perubahan yang diinginkan dalam kehidupan yang layak seperti sedia kala tanpa ada permasalahan.

Faktor ideologi relawan aksi sebagai gerakan sosial baru

Kacamata gerakan sosial baru berlandaskan ideologi. Ideologi tidak dipegang oleh individu saja akan tetapi ideologi kelompok lain yang ikut serta dalam pergerakan harus satu ideologi. Paradigma gerakan sosial baru atau *new social movement* berawal karena hasil dari keputusan gerakan pada era post-industrial. Temuan dalam gerakan penolakan pembangunan kilang minyak ini adalah gerakan dari faktor volunteerisasi aksi. Volunteerisasi aksi adalah relawan aksi untuk melakukan penolakan agar menambah kekuatan massa. Relawan aksi penolakan dilakukan oleh individu maupun dari kelompok/komunitas yang berasal dari desa di Jenu yang terdampak (Ring 1), masyarakat diluar Jenu, dan komunitas satu ideologi yang menjadi relawan dan membantu dalam penolakan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Jenu Kabupaten Tuban.

Kepercayaan dari masyarakat

Masyarakat lokal maupun penguat gerakan resistensi dan petani maupun pemilik lahan yang masih berjuang seperti selaras dengan tujuan yakni menolak pembangunan atau pembatalan pembangunan dengan cara berbagai penolakan. *Belief* atau kepercayaan masyarakat dikuatkan dengan tambahan dari suara-suara aktor lokal, aktor luar lokasi pembangunan, dan kelompok lain di luar desa. Kekuatan ini disebut juga jejaring sosial yang kritis terhadap ketidaksesuaian penetapan lokasi yang merugikan masyarakat.

Tindakan kontrol sosial masyarakat

Kontrol sosial yang dilakukan masyarakat pro pembangunan melakukan pendekatan secara humanis melalui pemerintah lokal kepada pihak kontra terhadap pembangunan Kilang Minyak PT. Pertamina Jenu Kabupaten Tuban. Pendekatan individual dilakukan oleh pemerintah lokal untuk mengurangi dampak negatif ketika masyarakat melakukan penolakan-penolakan. Kontrol sosial pihak kontra pembangunan memiliki cara, salah satunya sebelum melakukan penolakan/aksi, kelompok kontra melakukan surat menyurat/regulasi perijinan kepada Polres Tuban yang bertujuan mengurangi dampak pidana terhadap kelompoknya yang ingin menyampaikan aspirasi penolakan secara publik.

Gerakan resistensi masyarakat menurut James C. Scott

Tindakan perlawanan dari James C. Scott (1990, p. 303), perlawanan merupakan tindakan yang sekurang-kurangnya melibatkan suatu pengorbanan perorangan, kolektif jangka pendek dan upaya memperoleh keuntungan bersama

yang berjangka panjang, kerugian-kerugian jangka panjang dari pemogokan, pemboikotan atau bahkan penolakan memperoleh pekerjaan atau tanah garapan merupakan bentuk pengorbanan jangka pendek yang diharapkan mampu memberi keuntungan jangka panjang. Resistensi yang terbuka bersifat; terorganisasi, sistematis dan kooperatif; berprinsip atau tanpa pamrih; mempunyai akibat-akibat revolusioner; mengandung gagasan dan tujuan yang meniadakan dasar dari dominasi itu sendiri (Alisjahbana, 2005, p. 24).

- 1) Pemasangan pamflet/banner/tulisan/gapura dari kayu bertuliskan Penolakan.
- 2) Aksi Unjukrasa/Demo Di Balai Desa, Kantor Kecamatan Jenu, Polres Tuban, Pengadilan Surabaya.
- 3) Pengembalian Surat/Undangan Sosialisasi Ke Balai Desa.
- 4) Menutupi Lokasi/Menghadang. Ketika Petugas Pengukuran Ke Lokasi Lahan Warga.
- 5) Pemutaran Film Dokumenter "Sexy Killer".
- 6) Syukuran/tumpengan/doa bersama agar penolakan berhasil.
- 7) Penolakan dengan menggunakan narasi berdasarkan ilmu hukum dari aktor penolak.
- 8) Pembuatan kaos "*Tuban gak di dol*".
- 9) Penolakan Menteri Kelautan dan Perikanan, dengan narasi "bila mengganggu nelayan maka ijin reklamasi tidak akan diberikan".

Resistensi terselubung bersifat; tidak terorganisasi, tidak sistematis, dan individual; berpamrih; tidak mempunyai akibat revolusioner (Alisjahbana, 2005, p. 24). Gerakan resistensi tertutup atau terselubung adalah melakukan kolektif yang berawal dengan melakukan gosip-gosip dan penyebaran isu-isu kemudian dipahami dengan benar. Biasanya melakukan resistensi secara individual dan resistensi ini tidak memiliki power untuk melakukan perubahan yang diinginkan oleh pihak-pihak yang melakukan resistensi tertutup.

- 1) Intimidasi dari petani lainnya. Intimidasi pemilik lahan yang belum setuju kepada pemilik lahan yang setuju. Dengan cara tidak akan mengairi lahannya.
- 2) Intimidasi warga/komunitas dan menjauhi teman/warga yang memiliki relasi dengan pemerintah dan pihak kepolisian.
- 3) Perkumpulan tertutup. Untuk melakukan rembukan sebelum melakukan aksi.
- 4) Pencabutan patok pembatas secara diam-diam
- 5) Gosip/isu burung adanya harga lahan yang murah

- 6) Melakukan pemboikotan dalam sosialisasi

Penutup

Kesimpulan

Ketidaksesuaian masyarakat terhadap *corporate* yakni PT. Pertamina menimbulkan konflik sosial yang menjadikan masyarakat melakukan resistensi secara kolektif. Resistensi dilakukan dengan adanya dorongan dari aktor untuk memobilisasi gerakan resistensi. Aktor gerakan resistensi melihat peluang dampak negatif pembangunan kilang minyak yakni perekonomian petani semakin tertindas, adanya hilangnya lahan hijau pertanian yang digunakan untuk bercocok tanam, dan ketakutan kerusakan lingkungan pasca pembangunan kilang minyak tersebut. Kekuatan gerakan resistensi juga ditambah adanya volunteer komunitas/masyarakat diluar Jenu yang ikut serta membantu penolakan ingin mempertahankan lahan agar tidak digunakan pembangunan kilang minyak PT. Pertamina. Faktor lain juga adanya aktor yang bermain di belakang layar karena kerentanan konflik yang ada di masyarakat memiliki peluang politik digunakan untuk mencari empati. Peluang politik terjadi karena 2019-2020 waktu pemilihan serentak di Indonesia, peluang ikut campur aktor politik yang kurang dirasakan oleh masyarakat menjadikan kekuatan gerakan resistensi tidak berlanjut kuat kemudian enggan untuk melakukan resistensi terhadap pembangunan kilang minyak PT. Pertamina di Jenu, Tuban.

Faktor-faktor keresahan masyarakat ini menjadikan kepercayaan (*belief*) masyarakat terhadap aktor penguat gerakan untuk melakukan gerakan resistensi secara kolektif maupun kelompok kecil. Akan tetapi, masyarakat pro maupun kontra terhadap pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Jenu, Tuban juga melakukan gerakan yang bersifat represif (kontrol sosial) sebagai cara melakukan tujuan (*goal*) yakni menolak pembangunan kilang minyak PT. Pertamina. Tindakan penolakan dalam gerakan resistensi masyarakat seperti dalam teoritik milik Scott yakni adanya resistensi masyarakat terbuka dan tertutup/tersamar/terselubung. Akan tetapi, ditemukan dinamika baru dalam resistensi yang terjadi dalam konflik di pembangunan kilang minyak PT. Pertamina Jenu, Tuban yang dimana resistensi milik Scott masuk dalam gerakan sosial lama/klasik yang dimana gerakan dominan pada problematika ekonomi dan politik/kekuasaan. Dalam temuan ini adanya tambahan problematika kesadaran penjagaan/pelestarian lingkungan yang dimana gerakan sosial tersebut masuk dalam gerakan sosial baru. Gerakan sosial baru berbentuk kesadaran untuk mempertahankan lingkungan alam agar tetap terjaga tidak rusak karena aktifitas perusahaan.

Teori Scott dalam menganalisis permasalahan gerakan resistensi masyarakat dengan bentuk resistensi terbuka dan tertutup atau tersamar tidaklah selalu sama dengan model resistensi pada gerakan sosial klasik atau lama. Gerakan resistensi dilihat kembali faktor pendorong masyarakat melakukan resistensi. Gerakan resistensi milik Scott pada gerakan sosial klasik lebih menjelaskan faktor permasalahan ekonomi yang muncul dari konflik antara pemodal dan petani atau pekerja dan peluang kekuasaan dalam pengaruh politik. Sedangkan, gerakan resistensi bisa berkembang dengan gerakan sosial baru atau *New Social Movement*

yang dimana analisa teoritik gerakan sosial baru melihat dimana gerakan resistensi karena ada faktor ideologi kelestarian alam dalam pencegahan *global warming*.

Saran

Masyarakat harus sadar bahwa gerakan penolakan harus dari komitmen kelompok tanpa terpengaruh aktor-aktor yang berlandaskan politik. Karena gerakan penolakan karena terpengaruh peluang perpolitikan yang memberi empati hanya berpeluang mencari suara yang digunakan dalam pemilihan suara. Sedangkan, peluang gerakan resistensi karena perpolitikan sebagai *goal* atau tujuan hanya akan menjadi berwaktu pendek tanpa ada jangka panjang. Kelompok komunitas dan kelompok masyarakat yang ikut serta harusnya berkomitmen ideologi yang kuat dan memiliki peluang tujuan dalam penolakan tanpa pamrih kecuali hanya untuk membatalkan pembangunan PT. Pertamina. Pihak PT. Pertamina seharusnya juga melakukan proses yang menggunakan pendekatan humanis dalam merangkul masyarakat dan melakukan *social mapping* untuk mengurangi dampak sosial, ekonomi lingkungan dan anarkisme. Saran untuk peneliti berikutnya untuk melakukan pengkajian ulang dengan tujuan menguatkan kajian yakni agar melihat atau mengkaji lebih kuat aspek budaya pada masyarakat yang melakukan resistensi terhadap pembangunan perusahaan. Aspek budaya lokal dibutuhkan karena aspek budaya bersifat lokal yang dapat menjadi faktor resistensi masyarakat tambahan. Bukti aspek budaya lokalitas dari masyarakat adalah adanya nilai dan norma yang digunakan oleh setiap daerah dalam melakukan aktifitas sehari-hari dan setiap daerah memiliki kekhasan aspek budaya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Alisjahbana. (2005). *Sisi Gelap Perkembangan Kota*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Creswell, J. W. (2002). *Research Design: Desain Penelitian*. Jakarta: KIK Press.
- Darmadi, H. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Dan Sosial: Teori Konsep Dasar Dan Implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Endraswara, S. (2009). *Metode Penelitian Folklor Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: MedPress.
- Habibi, A. W., & Jacky, M. (2020). Perlawanan Masyarakat Terhadap Corporate Social and Responbility (CSR) PT. PJB Tuban. *Jurnal Paradigma*, 1-21.
- Hikmat, M. M. (2011). *Metode Penelitian Pendidikan dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Bandung: Graha Ilmu.
- Huberman, M. B. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. California: Sage Publications.

- KPPIP. (2019, Mei Jumat). *Kilang Minyak Tuban*. Retrieved from Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas: <https://kppip.go.id/proyek-prioritas/minyak-gas/kilang-minyak-tuban/>
- Luke, H. (2017). Social resistance to coal seam gas development in the Northern Rivers region of Eastern Australia: Proposing a diamond model of social license to operate. *Journal Land Use Policy*, 266-280.
- Manalu, D. (2007). Gerakan Sosial dan Perubahan Kebijakan Publik: Kasus Perlawanan Masyarakat Batak vs PT. Inti Indorayon, di Porsea, Sumatera Utara. *Jurnal Populasi*, 27-50.
- Manaqib, I. W., & Erina, M. (2020). *Teori Tindakan Voluntaristik Talcott Parsons dalam Studi Social Research*. Banyumas: Pena Persada.
- Mirsel, R. (2004). *Teori Pergerakan Sosial; Kilasan Sejarah dan Catatan Bibliografis*. Yogyakarta: Resist Book.
- Mudzakir, A. (2019). Pengendalian Massa dalam Pemikiran Gustave Le Bon. *Jurnal Kajian Ruang Sosial-Budaya*, Vol. 3, No. 1, 65-78.
- Mustain. (2007). *Petani vs Negara: Gerakan sosial petani melawan hegemoni negara*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Pertamina, P. (2020). Retrieved from <https://www.pertamina.com/>
- Prastya, A. (2018). Perlawanan Pedagang Kaki Lima (PKL) Terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Madiun (Studi Kasus: Upaya mempertahankan lapak dalam rangka untuk hidup). *Disertasi*. Universitas Muhammadiyah Malang: Program Doktor Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Presiden. (2012). *Indonesia Patent No. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012*.
- Rahman, N. E. (2019). Resistensi Petani Tembakau Terhadap sistem kemitraan perusahaan tembakau di Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta dan Iamongan Jawa Timur. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 35-57.
- Ritzer, G. (2016). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rozikin. (2015). Pengelolaan Sektor Minyak Bumi di Indonesia Pasca Reformasi: Analisis Konsep Negara Kesejahteraan. *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 128-140.
- Ruslina, E. (2012). Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 49-82.

- Rusmanto, J. (2017). *Sosiologi Politik: Gerakan Sosial dan Pengaruhnya Terhadap Studi Perlawanan Edisi 2*. Surabaya: Pustaka Saga.
- Scott, J. C. (1990). *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven and London: Yale University Press.
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmana, O. (2016). *Konsep dan Teori: Gerakan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.
- Susilo, R. K. (2012). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Wahyudi. (2005). *Formasi dan Struktur Gerakan Sosial Petani: Studi Kasus, Reklaming/Penjarahan atas Tanah PTPN XII (Persero) Kalibakar Malang Selatan*. Malang: UMM Press.
- Yin, R. K. (1994). *Case Study Research: Design and Methods*. United States of America: Sage Publications.

